

**PENYELESAIAN TALAK DI LUAR MAHKAMAH
SYARIAH SERI MANJUNG PERAK
DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



Oleh:

SITI NAZIRAH BINTI ZAKARIA

NIM : 10721000425

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWÂL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU 2010 M/1431 H**

ABSTRAK

Judul Skripsi ini berjudul adalah “ **Penyelesaian Talak di Luar Mahkamah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Mahkamah Seri Daerah Seri Manjung, Negeri Perak, Malaysia)**”.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana prosedur talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung dan bagaimana penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak karena Lokasi ini mudah dijangkau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk, prosedur dan penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung (Perak) dalam perspektif hukum Islam.

Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan bahan analisis. Data-data yang terkumpul tersebut bersumber kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data skunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif.

Setelah peneliti melakukan penelitian, maka dapat diketahui dalam perspektif hukum Islam bahwa, walaupun talak itu sah saja dilafazkan di luar mahkamah atau di rumah, namun untuk menjaga agar suami jangan seenaknya saja melafazkan kata talak sesuka hati maka selain mematuhi seluruh syariat Islam, seorang muslim juga diharuskan menghormati Undang-undang dan Peraturan Negara di mana ia berdomisili, maka ia wajib mematuhi dan jangan sampai melanggar peraturan yang ada untuk mengfungsikan lembaga peradilan Islam.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
 Bab II Gambaran Umum Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak	
A. Geografis dan Demografis	15
B. Pendidikan.....	17
C. Gambaran Umum Institusi (Jabatan) Kehakiman Syariah Perak, Manjung	19
 Bab III Tinjauan Umum Tentang Talak	
A. Pengertian Talak	25
B. Syarat dan Rukun Talak	29
C. Hukum Menjatuhkan Talak	32
D. Macam-Macam Talak	34
E. Hikmah Talak	39

Bab IV Bentuk, Prosedur Dan Penyelesaian Talak Di Luar

Mahkamah Syariah Seri Manjung

A. Bentuk-bentuk Talak di Luar Mahamah Syariah Seri Manjung	42
B. Prosedur Talak di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung.....	53
C. Penyelesaian Talak di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung Dalam Perspektif Hukum Islam	65

Bab V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam syariat Islam merupakan ikatan perjanjian yang kuat dan kokoh yang dengannya Allah mengikat laki-laki dan perempuan menjadi bersatu, sehingga mereka disebut suami istri, setelah sebelumnya sebagai individu. Jalinan hubungan itu ditegakkan melalui ketenteraman, damai, cinta dan kasih sayang. Perkawinan merupakan salah satu ayat (tanda) di antara tanda-tanda-Nya di alam semesta, seperti penciptaan insan dari tanah (berbeda suku, bangsa, warna kulit dan bahasa), penciptaan langit dan bumi. Jalinan kokoh yang dirajut setelah terlebih dahulu dicari, diupayakan dengan susah payah melalui *ta'arruf* (perkenalan), pinang meminang, mahar dan *walimat al-'arusy* (pesta perkawinan yang menelan biaya yang kadangkala tidak murah).

Perkawinan merupakan perkongsian hidup yang disahkan oleh agama dan perundangan Negara (Malaysia, khususnya di Negara bagian Perak, Seri Manjung), begitu juga negara Indonesia. Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹ Suatu amanah yang disertai dengan tanggung jawab moral. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan agama yang suci dan untuk menghindari kumpul kebo (*samen leven*), bagai binatang hidup tanpa aturan, dan sebagai tanda komitmen terhadap pasangan. Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, mendapat zuriat (keturunan) yang sah dan mengelakkan tohmahan (tuduhan berbuat serong) serta maksiat. Untuk mendirikan rumah tangga bahagia dan

¹Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, Cetakan I, Agustus 2006), hal. 7.

sejahtera (lahir dan batin, dunia dan akhirat) setiap pasangan (calon suami istri) itu harus ada persediaan kerohanian (siap mental). Pasangan yang ingin kawin perlu menyadari akan memikul tanggung jawab moral, sosial dan ekonomi sebagai suami istri. Setiap pasangan juga perlu bersifat matang (fisik dan psikis). Di samping itu, calon suami istri harus banyak membaca dan berbagi pengalaman dengan mereka yang telah melalui alam rumah tangga tentang cara-cara mengatasi masalah kesulitan rumah tangga. Calon suami istri juga harus mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam mengurus hal ihwal rumah tangga. Di Seri Manjung (Perak) calon suami istri harus menempuh kursus dan mendapat sertifikat atau surat keterangan kursus kawin sebelum melakukan perkawinan secara resmi.

Kesehatan rohani dan jasmani juga merupakan faktor utama bagi pasangan mendapatkan zuriat (keturunan yang sehat dan cerdas). Bagi seorang wanita, mengandung pada umur di bawah 18 tahun adalah kurang baik dan tidak digalakkan, karena pada umur tersebut tubuh wanita itu sedang dalam pertumbuhan dan perkembangan dan belum siap untuk mengalami perubahan-perubahan fizikal dan fisiologikal semasa mengandung. Umur yang ideal bagi wanita untuk menjadi seorang ibu rumah tangga ialah antara 20-30 tahun. Seringnya terjadi perceraian, terutama menyimak kasus-kasus yang terjadi di daerah Seri Manjung (Perak), yang melafazkan talak di luar Mahkamah atau di dalam rumah sendiri, karena emosional yang tinggi dan tak terkendali, kurangnya persiapan calon suami istri mempersiapkan diri untuk mengharungi bahtera rumah tangga secara fizik (jasmani), psikis (rohani) dan ekonomis (sumber penghasilan yang memadai untuk menjamin kelangsungan hidup berumahtangga).

Ajaran Islam memperbolehkan laki-laki menjatuhkan talak sebagai terapi jika sudah tidak ada jalan keluar yang dapat mendamaikan dan merujuk kesadaran kedua belah pihak, ketika

fikiran telah kacau dan hubungan suami istri telah rusak sedemikian parah, maka jalan terakhir untuk mengobatinya (seperti penyakit) adalah disuntik. Tetapi talak tidak boleh dilakukan kecuali setelah berbagai macam terapi terlebih dahulu dicoba dan diupayakan dengan sungguh-sungguh, seperti memberi nasehat, meninggalkannya di tempat tidur (pisah ranjang), mendidik, memberi sanksi ringan dan setelah sedapat mungkin menanggung rasa benci dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukainya, demi melaksanakan firman Allah Swt. (surah *al-Nisa'* ayat 19),



Artinya: Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²

Thalaq (talak dalam bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang halal dilakukan, tapi paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Swt. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw ;

ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود ابن ماجه والحكم)

Artinya: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak (cerai). (H.R.Abu Dawud dan Ibnu Majah serta menshahihkannya al-Hakim).³

Janji sehidup semati suami istri mungkin hanya berlaku dalam agama Kristen Katolik. Menurut Kristen Katolik, suami istri tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Islam membolehkan talak kalau pasangan suami istri sudah tidak mampu lagi mempertahankan keharmonisan dan kebahagiaan bahtera rumah tangga. Ia berlaku apabila terjadi pergolakan

²Yayasan Penyelenggara penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2005), hal.80

³Ibnu Hajar al-Asqalani (773-852 H), *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Bandung, Indonesia, Syirkah Liththab,i wa al-Nasyr, t.t), hal. 246.

dalam rumah tangga yang tidak ada jalan penyelesaian baginya atau apabila terdapat pihak-pihak yang mengakhiri suatu perkawinan.⁴

Setelah menjatuhkan talak, bekas suami harus menunaikan tanggung jawab dan kewajiban terhadap mantan istrinya. Justru itu, bekas suami, di antaranya, harus melunasi mahar yang belum dibayar (karena nikah dengan mahar secara hutang atau tidak dengan tunai), memberi nafkah wajib selama masa *iddah*, memberi upah penyusuan anak dan nafkah mereka hingga dewasa dan memberi *mut'ah* (pemberian suami ke atas istri selama menjadi istri karena melayani suami dengan baik). Setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian harta benda). Firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 241,



Artinya: Kepada para wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.⁵

Dilihat dalam perspektif hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah atas dasar *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang). Oleh karena itu, kedua calon suami istri harus memahami konsep ini. Namun begitu, Islam tetap memberi kelonggaran kepada manusia untuk menjamin kebahagiaan dan kelangsungan hidup. Islam membenarkan perceraian, sekiranya itu adalah jalan akhir dan penyelesaian terbaik bagi pasangan tersebut daripada meneruskan kehidupan yang sudah tidak mampu untuk memberi kebahagiaan kepada pasangan suami dan istri serta anak-anak yang ada pada masa yang sama untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt.

⁴Mohd Naim Haji Mokhtar, *Talak ; Konsep dan Perlaksanaan Di Mahkamah Syariah Jabatan Undang-Undang Islam, Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim*, (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2000), hal. 136

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op,cit, hal.39.

Dalam perceraian, terutama melihat kasus-kasus yang terjadi di daerah Seri Manjung Perak, yang melafazkan talak di luar mahkamah atau di dalam rumah sendiri, karena emosional yang tinggi dan tak terkendali, kurangnya mempersiapkan diri untuk mengharungi bahtera rumah tangga secara fisik (jasmani), psikis (rohani) dan ekonomis (sumber penghasilan yang memadai untuk menjamin kelangsungan hidup berumah tangga secara materi). Persoalan talak di depan Sidang Negeri Perak diatur di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak tahun 1984 (Pindaan/Penjelasan 1992). Talak adalah sebagian dari daripada sistem perkawinan dalam ajaran Islam yang dijelaskan dalam Undang-Undang Islam Seri Manjung (Perak) dan telah diakui oleh Sistem Perundangan Negara. Penyelesaian talak di luar Mahkamah menurut aturan Enakmen keluarga Islam Perak antara lain dijelaskan bahwa Perceraian dianggap tidak sah jika terjadi perceraian di luar Mahkamah, harus diulang mengadap Mahkamah (di depan sidang) untuk melafazkan talak (diakui qadhi dan saksi-saksi) dan diberi surat cerai.⁶

Pengaturan talak di depan Sidang Pengadilan Syariah dapat disimak pada Enakmen 144 dan 119 dan dalam Enakmen 44e ayat 1. Enakmen ini menjelaskan tentang permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah terhadap suami istri yang ingin bercerai harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk bercerai kepada Mahkamah dalam formulir yang disertai dengan suatu pengakuan mengenai perceraian yang akan dilakukan. Sementara Enakmen 119 mengenai perceraian di luar Mahkamah dan tanpa persetujuan peradilan, jika laki-laki (suami) menceraikan istrinya dengan melafazkan dengan bentuk apa saja di luar sidang Mahkamah Syariah (tanpa pengakuan Mahkamah), maka laki-laki (suami) itu telah melakukan suatu kesalahan, karena bercerai di luar Mahkamah dan dalam masa tujuh hari setelah talak itu dilafazkan di luar Mahkamah, maka hendaklah bagi pihak-pihak yang

⁶Azizan Bin Ismail, (Qadhi Mahkamah Rendah Seri Manjung, Perak), *Wawancara*, tanggal 10 Maret 2009.

berkewajiban (istri atau saksi-saksi yang mengetahui perceraian ini) melaporkan perceraian itu (perbuatan) itu kepada Mahkamah. Perbuatan itu merupakan suatu kesalahan dan akan disanksi tidak melebihi tiga ribu ringgit Malaysia (RM 3000) atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya (sanksi dan dipenjara), jika terbukti melakukan kesalahan.

Walaupun aturan Undang-Undang telah diadakan, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, talak di luar Mahkamah masih juga dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. Lazimnya talak bermula dari adanya pertengkaran, perselisihan faham atau pergaduhan yang berlaku di luar kawalan fikiran yang sehat dimana suami di bawah kontrol akal sehat, karena marah menjatuhkan ucapan talak terhadap istrinya. Kebanyakan istri yang diceraikan di luar Mahkamah ditinggalkan oleh suaminya tanpa tanggung jawab moral dan material. Apabila terjadi demikian, pihak istri sukar untuk membuktikan perkara yang diajukan ke Mahkamah Syariah dan ditambah lagi pihak suami jelas tidak mau memberi kerjasama yang baik.

Dalam Enakmen Keluarga Islam (Perak) mengatur dalam bagian IX, fasal 125 tentang penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah :

Laki-laki yang menceraikan istrinya dengan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.⁷

Perceraian di luar Mahkamah Syariah masih terjadi di Seri Manjung yang akhirnya mereka harus mendaftarkan di Mahkamah Rendah Syariah Seri Manjung dan dikenakan denda bagi suami yang melafazkan talak di luar Mahkamah. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus Razak bin Ali dan Ismawati binti Suleiman bercerai di luar Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2008 Masehi sesudah waktu maghrib, bertempat di Rumahnya sendiri, Nomor 22,

⁷Perak, *Enakmen Keluarga Islam*, (Perak, 2004), hal. 470.

Taman Sri Selamat, 32000 Sitiawan, Perak. Perceraian di luar Mahkamah syariah ini didaftarkan dan disahkan penceraianya oleh hakim pada tanggal 19 Juli 2008 Masehi dan disidangkan oleh Mahkamah Syariah pada tanggal 12 Agustus 2008. Setelah sidang dilaksanakan, Hakim mengesahkan lafaz talak yang dilakukan oleh suami di luar Mahkamah dan memutuskan denda sebanyak RM 2000 (RP 6000000) atas kesalahan yang dilakukan oleh suami, (Razak) karena melafazkan talak di luar Mahkamah. Denda yang dikenakan mendapat budi bicara dari Hakim karena suami membuat permohonan agar denda dikurangkan.⁸

Penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah menurut aturan Enakmen Keluarga Islam Perak, dapat dipandang sebagai *al-Siyasah al-syar'iyah* yaitu pengaturan yang dilakukan pemerintah (Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak Malaysia atau Kompilasi Hukum Islam Indonesia) untuk merealisasikan asas *Jalbu al-mashalihi wa daf'u al-mafasidi* (Mengambil kemaslahatan dan menolak mudarat). Pengaturan ini dilakukan sejauh tidak melampaui dasar-dasar syariat universal Islam, kendatipun tidak sejalan dengan sebagian hasil ijtihad para mujtahid sebelumnya. Pemerintah sebagai *Ulu al-amri* (Penguasa di negara Islam) dapat membuat ketentuan dan aturan yang mengikat masyarakat muslim selama tidak bertentangan dengan maksud diturunkannya syariat Islam (*Maqashidu al-tasyri'*). Adanya ketentuan perkawinan dan perceraian dalam perundang-undangan (peraturan pemerintah) tidak mengurangi ketentuan dan hukum yang berlaku dalam lembaga perkawinan dan perceraian, inklusif dalam Islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan menganalisa persoalan-persoalan yang terkait dengan **PENYELESAIAN TALAK DI LUAR MAHKAMAH SYARIAH SERI MANJUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

⁸Data dari Mahkamah Rendah Syariah Seri Manjung, Perak.

B. Batasan Masalah

Mengetahui interpretasi hukum syariat (fikih, hasil ijtihad fuqaha), terutama mengenai talak, merupakan sesuatu yang sangat luas dan kompleks, maka untuk mendapatkan pembahasan yang efektif dan objektif, perlu dibatasi masalah penelitian ini pada : Talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung, Perak.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak ?
2. Bagaimana prosedur penjatuhan talak di Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak ?
3. Bagaimana penyelesaian talak yang dilakukan di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung dalam perspektif hukum Islam ?

D. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelaskan sasaran yang akan dapat dicapai melalui penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung.
- b. Untuk mengetahui prosedur talak di Mahkamah Rendah Syariah Seri Manjung.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung (Perak) dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- b. Memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku akademik di bidang hukum terutama tentang kasus tinjauan terhadap umat Islam yang melakukan talak dan undang-undang negara bagian Perak, Seri Manjung khususnya, terhadap penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah.
- c. Dapat memberi sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, terutama dalam talak yang jarang dikaji secara spesifik padahal terjadi di tengah-tengah masyarakat dan cukup memprihatinkan, karena kurangnya ilmu pengetahuan mereka.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Lokasi penelitian ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Seri Manjung Perak Darulridzuan, Malaysia.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang melanggar ketentuan hukum, yaitu suami yang melafazkan talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung.
- b. Yang menjadi objek penelitian adalah Penyelesaian Talak di luar Mahkamah Seri Manjung, Perak Darulridzuan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah orang-orang yang melanggar hukum dengan melafazkan talak di luar Mahkamah Seri Manjung. Seluruhnya berjumlah 13 orang, karena responden berjumlah 13 orang maka penelitian ini tidak dijadikan sampel.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari para pelanggar hukum yaitu suami istri yang melakukan talak di luar Mahkamah Seri Manjung, pegawai-pegawai dan hakim Mahkamah.
- b. Sumber Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari Mahkamah Seri Manjung yang berkaitan serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu penulis mengamati secara langsung penyelesaian kasus talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung yang disidangkan dalam Mahkamah Syariah Seri Manjung.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti. Pertanyaan ditujukan kepada pihak yang berkaitan, seorang Hakim, seorang Qhadi, seorang Pendaftar, seorang penolong pendaftar, suami dan istri yang menjatuhkan talak di luar Mahkamah seramai 13 orang.⁹
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung.

⁹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Rawamangun, Jakarta Timur : Prenada Media, Cetakan I, Juli 2003), hal. 384 dan 385.

6. Analisa Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa melalui Metode analisa deskriptif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.¹⁰

7. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif, yaitu dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa, kemudian diambil secara umum.
3. Metode Deskriptif Analitis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan XIII, Agustus 2006), hal. 15.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini secara keseluruhan terdiri daripada lima bab yang antara satu dengan yang lainnya memiliki perincian sebagai berikut:

Bab I: Merupakan uraian pendahuluan yang terdiri daripada Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Landasan Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Gambaran Umum Mahkamah Syariah Seri Manjung, Perak, geografin dan demografin, latar belakang pendidikan dan gambaran umum institusi (Jabatan) Kehakiman Syariah Negari Perak, Manjung.

Bab III: Tinjauan umum tentang talak; Membahas tentang Pengertian Talak, Syarat dan Rukun Talak, Hukum Menjatuhkan Talak, Macam-Macam Talak dan juga Hikmah Talak.

Bab IV: Merupakan uraian yang menjadi masalah pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu bentuk-bentuk, prosedur dan penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung, Perak ; Bentuk-bentuk Talak yang Berlaku di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung, Prosedur Penjatuhan Talak yang Dilakukan di Mahkamah Syariah oleh Mahkamah Seri Manjung dan Penyelesaian Talak di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab V: Merupakan penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan juga Saran-Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM MAHKAMAH SYARIAH SERI MANJUNG PERAK

A. Geografis dan Demografis

Mahkamah Syariah Seri Manjung merupakan salah satu pengadilan bagi umat Islam yang berada di Daerah Manjung dan Perak Tengah. Daerah Manjung merupakan salah satu dari sembilan daerah di Negeri Perak Darul Ridzuan. Berbatasan dengan Daerah Larut Matang dan Selama dan Daerah Kuala Kangsar di sebelah utara, berbatasan dengan Daerah Hilir Perak di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah barat. Jarak dari Ipoh (Ibu Kota Negeri Perak) ke Lumut adalah 80 kilometer, dari Kuala Lumpur (Ibu Negara Malaysia) 200 kilometer dan Penang 180 kilometer. Daerah Manjung memiliki luas seluas 1168.9 kilometer persegi.

Luas Daerah Manjung adalah 116,800 hektar (1,168.0 kilometer persegi) dan terbagi kepada lima mukim, iaitu:

1. Sitiawan (33,150 hektar/ 331.5 kilometer persegi).
2. Pengkalan Baharu (25,640 hektar/ 256.4 kilometer persegi).
3. Lumut (25,120 hektar/ 251.2 kilometer persegi).
4. Beruas (19,160 hektar/ 191.6 kilometer persegi).
5. Lekir (13,730 hektar/ 137.3 kilometer persegi).

Tabel 1

Jumlah Penduduk

No.	Nama Mukim	Penduduk	Keluasan
1	BERUAS	10,132 orang.	19,160 hektar.
2	LEKIR	9,069 orang.	13,730 hektar.
3	LUMUT	68,799 orang.	27,320 hektar.
4	PENGKALAN BHARU	28,055 orang.	25,640 hektar.
5	SITIAWAN	95,920 orang.	33,150 hektar.

Sumber: Kantor Daerah Seri Manjung 2006-2010

Mahkamah Syariah Seri Manjung letaknya di tengah-tengah kota Daerah Seri Manjung. Pada tahun 2009 ini, penduduk Daerah seri Manjung berjumlah 211,975 orang terdiri atas 10,132 Mukim Beruas dengan keluasan 19,160 hektar. Mukim Lekir punya penduduk 9,069 orang, tanahnya 13,730 hektar. Mukim Lumut pula, 68,799 orang dengan keluasan tanah 27,320 hektar. Penduduk di Mukim Pengkalan Bharu terdiri atas 28,055 orang dengan keluasan 33,150 hektar. Keluasan Pengkalan TLDM 17.5km/per. (1.49). Tanah Simpanan Melayu pula 41,021 hektar (35.12%), Tanah Simpanan Hutan miliki keluasan 6,276 hektar (5.37%). Luas Kawasan Majlis adalah 301.82 km persegi dan Kawasan Operasi Majlis adalah 121.35 km persegi.

Sampai tahun 1980an, daerah ini masih dikenal sebagai Daerah Dinding. 1 Januari 1982, wilayah yang dulunya dikenal dengan panggilan Dinding diganti namanya menjadi Daerah Manjung yang mencakup satu unit administrasi yang meliputi mukim Beruas dan Sitiawan dan nama tersebut Demografi sampai sekarang.

Daerah Manjung telah menjadi tujuan utama wisatawan ke Negeri Perak di mana Pulau Pangkor dan Teluk Batik telah menjadi tumpuan utama wisatawan-wisatawan dari dalam dan luar negeri. Visi pembangunan sektor pariwisata adalah menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang utama kepada pembangunan Daerah Manjung.

B. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Hal ini karena manusia bukan semata-mata menjadi objek pembangunan tetapi sekaligus juga merupakan subjek pembangunan. Disinilah terletak arti penting dari pendidikan sebagai upaya untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia, sebagai persyaratan utama dalam pembangunan¹.

Suatu bangsa akan berhasil dalam pembangunannya secara “*self propelling*” dan tumbuh menjadi bangsa yang maju apabila telah berhasil memenuhi minimum jumlah dan mutu dalam pendidikan penduduknya².

Daerah Seri Manjung mempunyai beberapa mukim (kawasan) dan beberapa Sekolah Rendah (Sekolah Dasar), dan dapat kita lihat dari table dibawah ini:

Tabel 2

Sarana Pendidikan

No.	Jenis	Jumlah	Perincian
1	Sekolah Rendah Kebangsaan	40	-
2	Sekolah Jenis Kebangsaan Cina	25	-
3	Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil	15	-
	JUMLAH	80	-

¹ H. Hartomo, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 120- 121.

² Ibid

Sumber Data: Kantor Daerah Seri Manjung

Penduduk Daerah Seri Manjung merupakan masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan. Pendidikan menjadi keutamaan bagi penduduk Daerah Manjung karena faktor sekitar juga mempengaruhi masyarakat atas pentingnya pendidikan. Kepedulian terhadap pendidikan diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan formal mulai dari tingkat tabika (TK) sampai tingkat Lanjutan Pertama Sekolah Rendah (SD), Sekolah menengah (SMP) dan Pengajian Tinggi, sedangkan pendidikan nonformal diarahkan ke mesjid/ mushalla/ rumah guna untuk mendapatkan pendidikan khusus agama (metode ceramah, baca iqra'/baca Alqur'an, dan sejarah Islam).

Pada saat ini Daerah Seri Manjung dapat dibanggakan karena bukan saja jumlah para remajanya, namun dari semua lapisan masyarakat yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan dapat ditampung dalam pendidikan formal. Tidak sedikit juga dari mereka yang berkesempatan mendapatkan pendidikan nonformal dengan berbagai keahlian dan keterampilan.

C. Gambaran Umum Institusi (Jabatan) Kehakiman Syariah Negeri Perak, Manjung

Mahkamah Syariah adalah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jinayah (criminal) agama berdasarkan bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya.

Mahkamah Syariah punya matlamat dalam penubuhannya yaitu menjaga hal ihwal kekeluargaan Islam agar mendapat keadilan dalam menuntut hak dan kebajikan dalam perkara yang berkaitan dengan nikah kawin, talak, rujuk, fasakh dan sebagainya.

Matlamat Mahkamah Syariah yang lain adalah mengawasi masalah iman dan kufur di kalangan umat Islam seperti masalah solat, puasa, zakat dan murtad.

Menyelia dan menyelaraskan hal-hal yang berkaitan dengan harta pusaka dan tuntutan hak seseorang individu terhadap individu yang lain³.

Hakim Mahkamah Syariah Rendah Seri Manjung adalah Tuan Haji Ahmad Jazman Bin Haji Ulul Azmin.

Pegawai Tinggi Agama (Qadhi) di Seri Manjung adalah Drs Azizan bin Ismail yang merupakan kepala Pejabat Agama (Kantor Urusan Agama) Seri Manjung. Mahkamah dan Pejabat Agama saling berkait rapat.

Siti Hadzanah binti Hashim adalah sebagai Pendaftar di Mahkamah Syariah Seri Manjung, Perak dan Pembantu Pendaftar Mahkamah Syariah Seri Manjung adalah Sulaiman binti Razali.

1. Tujuan Mahkamah Syariah

- a. Mengekalkan (menetapkan) perundangan Islam yang diperuntukkan kepada Mahkamah Syariah untuk menjamin setiap Muslim agar patuh dan tidak melanggar perintah Allah Swt berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah (Rasulullah Saw).
- b. Menjalankan pertadbiran (peraturan) agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah untuk menjamin kesejahteraan orang Islam.
- c. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam.
- d. Menyelamatkan ummat Islam daripada perpecahan dan keruntuhan rumah tangga.

³ Badan Kehakiman Perak, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak, Jabatan Kehakiman Perak*, Ipoh, 2006 hal. 1

- e. Memberi bimbingan dan nasihat (kaunseling) kepada pasangan yang ingin berumahtangga agar dapat membina rumah tangga yang bahagia (harmonis) sebagaimana tuntunan agama.

2. Peranan Mahkamah Syariah

- a. Tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat (pelayanan) nasihat serta menyelesaikan masalah rumah tangga.
- b. Tempat membuat rayuan (aduan) daripada pihak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya yang sudah bercerai.
- c. Tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan, seperti ; nikah/kahwin (kawin), perceraian (talak), fasakh dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat, seperti ; judi, minum arak, riba, khalwat, dan lain-lain perkara munkar.
- e. Membantu serta menyelesaikan pembahagian harta pusaka (waris) dan hal-hal berkaitan seperti wasiat (hibah).
- f. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh kerajaan⁴.
- g. Badan yang dilantik oleh kerajaan yang bertanggung jawab memberi penerangan yang berkaitan dengan keagamaan, kekeluargaan dan senentiasa berdakwah sepanjang masa.
- h. Menerapkan nilai-nilai Islami agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.

3. Bidang Kuasa Jabatan Agama Islam

Pejabat Agama Islam menjalankan pentadbiran dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam bagi tiap-tiap negeri dan daerah di Malaysia. Bidang kuasa

⁴ Ibid, hal.2

yang diberikan adalah seperti perkawinan, penceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil. Pejabat agama Islam juga menjalankan pentadbiran dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan zakat, Baitulmal, dakwah, pendidikan, pengurusan masjid dan sebagainya.

4. Bidang kuasa jinayah Mahkamah Syariah adalah;
 - a. Kesalahan rumah tangga seperti penganiayaan isteri dan nusyuz.
 - b. Kesalahan yang berhubung seks seperti zina, khalwat, perbuatan sumbang dan melacur.
 - c. Kesalahan yang berhubungan dengan minuman keras.
 - d. Kesalahan berhubungan dengan aspek keimanan.
 - e. Kesalahan berhubungan dengan pangambilan anak angkat.

Kecamatan-kecamatan Mahkamah Negeri Perak ;

1. Mahkamah Tinggi Syariah

Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Perak dibagikan pada dua kecamatan. Tiap kecamatan diketuai oleh seorang hakim Mahkamah Tinggi yang akan mendengar dan bicarakan kasus-kasus mengikut wewenangannya, mendengar rayuan (banding) atau semakan kasus (kasasi) Mahkamah Rendah Syariah Kecamatan di bawahnya.

Mahkamah Tinggi Syariah berfungsi untuk :

- a. Membicarakan kes-kes (kasus-kasus) yang diperuntukkan kepadanya.
- b. Mengeluarkan perintah kes-kes sivil dan jenayah (jinayah).
- c. Menyelesaikan dan mengesahkan kes-kes faraidh.
- d. Mengurus kes-kes rayuan (pengaduan).

e. Menyediakan jurnal mahkamah untuk diterbitkan (bagi sebagian negeri)⁵.

Tugas Mahkamah Rayuan Syariah adalah ;

- a. Untuk mendengar kes-kes rayuan .
- b. Mempunyai kuasa pembatalan mana-mana (segala) sabitan (ketetapan) hukuman oleh Mahkamah Syariah.
- c. Mengurangkan hukuman.
- d. Memerintahkan supaya diadakan pembicaraan semula atau ulang bicara.
- e. Menerima rayuan (keluhan) responden yang telah membuat rayuan mengikut (menurut) prosedur yang telah ditetapkan.
- f. Setiap rayuan (aduan) akan didengar sekurang-kurangnya oleh tiga orang panel (hakim) rayuan dari Panel (Hakim) Rayuan Syariah yang dilantik dan ditauliah (disetujui) oleh Kadi Yang Maha Mulia (KDYMM Sultan), Ketua Hakim adalah Pengurusi (Panitera) Panel Rayuan Syariah.
- g. Keputusan Mahkamah adalah muktamad dan sah.⁶

2. Mahkamah Rendah Syariah

Mahkamah Rendah Syariah dibagikan pada enam kecamatan yang diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah bagi tiap kecamatan. Tiap kecamatan mempunyai daerah-daerah kecil, di mana tiap kasus hanya diarsipkan di bawah wewenang masing-masing.

Enam kecamatan tersebut adalah :

- a. Mahkamah Rendah Syariah Ipoh ; Meliputi Daerah Kinta.

⁵ Ibid, hal. 3

⁶Ibid, hal. 4

- b. Mahkamah Rendah Syariah Taiping ; Meliputi Daerah Larut, Matang dan Selama serta Kerian.
- c. Mahkamah Rendah Syariah Seri Manjung; meliputi Daerah Manjung dan Perak Tengah.
- d. Mahkamah Rendah Teluk Intan ; Meliputi Daerah Hilir Perak dan Batang Padang.
- e. Mahkamah Rendah Syariah Kuala Kangsar ; Meliputi Daerah Kuala Kangsar saja.⁷

⁷Ibid, hal. 6

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Secara harfiyah talak itu berarti berarti lepas dan bebas. Talak (*thalaq*) secara etimologi (*lughatan*), berasal dari kata *thalaqa, yathliqu wa thalaqun aw thalaqatan* berarti melepaskan ikatan (misalnya, *naqathun thaliqatun*, artinya, unta itu dibiarkan bebas memakan rumput di mana saja yang disukainya) atau kendali. Jika dikatakan *thalaqa lisanuhu*, berarti dia berbicara lancar tanpa gagap. *Thalaqta al-qauma*, artinya, engkau meninggalkan kaum dan *asirun muthliqun*, artinya, tawanan itu dibebaskan. *Thalaqu al-mar'ati* adalah memisahkannya dari suaminya. *Thalaqta al-bilada*, artinya, engkau meninggalkan negeri itu. *Thalaqu al-nisa'i* (talak wanita) digunakan dalam dua makna yaitu Pertama, melepas ikatan pernikahan, dan Kedua, membiarkan dan membebaskan. Bila ada tawanan dibebaskan, dia disebut *thaliqun*, yakni kini dia telah menjadi seorang manusia merdeka dan *uthliqati al-naqatu min 'iqaliha*, yaitu unta dilepas dari ikatannya.¹

Menurut pengertian bahasa talak berasal dari kata الاطلاق: الارسال yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Sebenarnya terdapat kata طلاق- يطلق- مراء من زوجة طلقه: wanita yang ditalak oleh suaminya.²

Lafazh ithlaq (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan menggunakan lafaz khusus.³

¹Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqhi al-Muqarani*, Majma' al-Syahid al-Shadr al-'Ilmi, Cetakan I, Qum, Iran, 1985 M, penerjemah Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi dan Ja'fari*, (Jakarta : Cahaya, Cetakan I, Juli 2007, Jilid III), hal. 509.

²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Depag. R.I), hal. 57.

³Ibid., h. 579.

Menurut istilah fiqih ialah حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية yaitu melepaskan ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri,⁴ atau melepaskan ikatan pernikahan tanpa adanya tebusan dengan *shighatun thaliqun* dan dengan syarat-syarat tertentu. Dengan kata, tanpa tebusan, maka akad talak *khulu'* keluar dari definisi di atas, karena talak *khulu'* terwujud dengan memberikan tebusan. Dengan kata *shifatur thaliqun*, maka pembatalan (*faskh*) pernikahan karena ada aib (cacat) dan kekuarangan pada salah satu pasangan suami istri tidak termasuk talak, karena ia menggunakan kata *faskh*. Arti talak yang lain adalah melepas ikatan pernikahan menggunakan kata talak dan semacamnya, atau artinya adalah menghilangkan ikatan pernikahan pada waktu sekarang dengan kata-kata khusus.⁵

Talak merupakan satu-satunya alternatif, solusi dan dampak positifnya, bahkan talak sebagai salah satu syariat dari Yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak diartikan sebagai ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Keharusan mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama diharapkan agar dalam proses perceraian jelas sebab-sebabnya dan ketika masih bisa didamaikan agar hakim berusaha dapat mendamaikan antara suami istri itu (talak) tidak mudah terjadi berkekalan sebuah perkawinan dapat diwujudkan, akibatnya akad nikah hanya terjadi sekali seumur hidup diharapkan Islam bahwa pernikahan itu untuk selamanya dan tidak untuk sementara waktu sahaja.⁶

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1 menegaskan bahwa

⁴Sayyib Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut Dar Al-Fikr, 1983, Juz 2), h. 206.

⁵Muhammad Ibrahim Jannati, *op.cit.*, hal. 510.

⁶Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *op.cit.*, hal.57.

Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang talak telah dijelaskan dalam al-Quran sebagaimana firman Allah Swt :

Artinya: (yang dapat dirujuki) Dua kali setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan apa yang baik (Q.S.Al-Baqarah/2;229).⁹

U 卩 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋 𐀌 𐀍 𐀎 𐀏 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦 𐀧 𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺 𐀻 𐀼 𐀽 𐀾 𐀿 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍 𐁎 𐁏 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝 𐁞 𐁟 𐁠 𐁡 𐁢 𐁣 𐁤 𐁥 𐁦 𐁧 𐁨 𐁩 𐁪 𐁫 𐁬 𐁭 𐁮 𐁯 𐁰 𐁱 𐁲 𐁳 𐁴 𐁵 𐁶 𐁷 𐁸 𐁹 𐁺 𐁻 𐁼 𐁽 𐁾 𐁿 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺 𐃻 𐃼 𐃽 𐃾 𐃿 𐄀 𐄁 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄴 𐄵 𐄶 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎 𐆏 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜 𐆝 𐆞 𐆟 𐆠 𐆡 𐆢 𐆣 𐆤 𐆥 𐆦 𐆧 𐆨 𐆩 𐆪 𐆫 𐆬 𐆭 𐆮 𐆯 𐆰 𐆱 𐆲 𐆳 𐆴 𐆵 𐆶 𐆷 𐆸 𐆹 𐆺 𐆻 𐆼 𐆽 𐆾 𐆿 𐇀 𐇁 𐇂 𐇃 𐇄 𐇅 𐇆 𐇇 𐇈 𐇉 𐇊 𐇋 𐇌 𐇍 𐇎 𐇏 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽 𐇾 𐇿 𐈀 𐈁 𐈂 𐈃 𐈄 𐈅 𐈆 𐈇 𐈈 𐈉 𐈊 𐈋 𐈌 𐈍 𐈎 𐈏 𐈐 𐈑 𐈒 𐈓 𐈔 𐈕 𐈖 𐈗 𐈘 𐈙 𐈚 𐈛 𐈜 𐈝 𐈞 𐈟 𐈠 𐈡 𐈢 𐈣 𐈤 𐈥 𐈦 𐈧 𐈨 𐈩 𐈪 𐈫 𐈬 𐈭 𐈮 𐈯 𐈰 𐈱 𐈲 𐈳 𐈴 𐈵 𐈶 𐈷 𐈸 𐈹 𐈺 𐈻 𐈼 𐈽 𐈾 𐈿 𐉀 𐉁 𐉂 𐉃 𐉄 𐉅 𐉆 𐉇 𐉈 𐉉 𐉊 𐉋 𐉌 𐉍 𐉎 𐉏 𐉐 𐉑 𐉒 𐉓 𐉔 𐉕 𐉖 𐉗 𐉘 𐉙 𐉚 𐉛 𐉜 𐉝 𐉞 𐉟 𐉠 𐉡 𐉢 𐉣 𐉤 𐉥 𐉦 𐉧 𐉨 𐉩 𐉪 𐉫 𐉬 𐉭 𐉮 𐉯 𐉰 𐉱 𐉲 𐉳 𐉴 𐉵 𐉶 𐉷 𐉸 𐉹 𐉺 𐉻 𐉼 𐉽 𐉾 𐉿 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜 𐊝 𐊞 𐊟 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐 𐋑 𐋒 𐋓 𐋔 𐋕 𐋖 𐋗 𐋘 𐋙 𐋚 𐋛 𐋜 𐋝 𐋞 𐋟 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻 𐋼 𐋽 𐋾 𐋿 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣 𐌤 𐌥 𐌦 𐌧 𐌨 𐌩 𐌪 𐌫 𐌬 𐌭 𐌮 𐌯 𐌰 𐌱

⁹Yayasan Penyelenggara penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 36

(diidzinkan) keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (Q.S. Al-Thalaq/65:1).¹⁰

Allah menyambung dengan firman-Nya lagi ;



Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadanya jalan keluar. (Q.S. Al-Thalaq/65:2).¹¹

Berdasarkan dalil-dalil di atas, syariat Islam membolehkan perceraian. Walau bagaimanapun hanya dilihat sejauh mana hubungan pasangan suami istri supaya jalan perceraian itu mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak (suami dan istri).

B. Syarat Dan Rukun Talak

1. Syarat Talak

Berdasarkan kepada syariat Islam bahwa suami yang mengucapkan atau menjatuhkan talaknya kepada istri oleh dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

Adapun syarat suami yang menjatuhkan talaknya ialah :

a. Berakal Sehat

¹⁰Ibid., hal. 558

¹¹Ibid., hal. 558

Yang dimaksudkan dengan akal yang sehat ialah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat dan waras pikirannya. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya itu kontinu atau kegilaannya itu hanya sewaktu-waktu yang diakibatkan oleh penyakit, atau (gila babi) umpamanya.

b. Kemauan Sendiri

Syarat yang menjatuhkan talak dianggap sah bila ia (suami) melakukan tanpa ada unsur-unsur paksaan. Oleh karena itu, tidaklah sah talaknya seseorang suami yang dilakukan karena paksaan oleh keluarga atau desakan orang lain. Adapun bentuk paksaan yang diperhitungkan oleh syara' adalah paksaan menurut asumsi yang dipaksa bila tidak melaksanakan paksaan tersebut maka ada yang mendapat celaka.¹²

2. Rukun Talak

Syara' mengadakan beberapa syarat ketika menjatuhkan talak untuk mengendalikan emosi, menjaga perasaan dan menjaga institusi keluarga. Sebabnya hubungan ini adalah suci. Beda dengan akad yang lain. Selain dari itu, talak memberi kesan yang mendalam dalam kehidupan perempuan karena ketinggian nilai yang dimiliki oleh wanita dengan menjatuhkan talak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Boleh jadi hidupnya seorang tanpa kawin selama-lamanya. Wanita yang membujang kebiasaannya membawa kepada kefasidan atau terjerumus ke lembah kejahatan atau kemaksiatan. Jika sempurna rukun dan syarat-syaratnya, maka adalah sesuai dengan syara' tanpa mendatangkan dosa padanya. Jika tidak salah satu daripadanya, maka pada dasarnya rukun talak terbagi kepada tiga yaitu:

a. Suami, yang mana selain suami tidak boleh mentalak.

¹²Sayid Sabiq, *op.cit*, Jilid 8, hal. 9

- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak.
- c. *Sighat*, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan secara sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat.¹³

Suami boleh menceraikan istri tapi tidak semua talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya dihukumkan sah. Terdapat beberapa syarat kelayakan pribadi yang berkaitan dengan diri suami. Tanpa kesempurnaan syarat itu maka talak yang dijatuhkan tidak sah, contohnya seperti berakal, pilihan sendiri dan sebagainya.¹⁴

Ulama' Hanafi berpendapat rukun talak merupakan lafaz yang dijadikan dalil, maknanya talak bahasa yaitu pembuangan, pelepasan atau meleraikan ikatan dalam perceraian secara terang dan memutuskan kebaikan, pemberian dan sebagainya dalam perceraian secara kiasan (kinayah). Ataupun makna pada syara' ialah menghilangkan keharusan bersetubuh atau isyarat yang boleh menggantikan lafaz talak.¹⁵

Selain dari ulama' Hanafi yang lain berpendapat bahwa talak ada beberapa rukun. Maksud rukun bagi jumhur ialah yang mewujudkan hakikat suatu, walaupun ia tidak termasuk didalamnya.¹⁶

Manakala ulama Maliki berpendapat rukun talak terbagi pada dua yaitu:

- a. Orang yang berkeelayakkan menjatuhkan talak. Artinya orang yang menjatuhkan talak itu adalah dari suami atau naib suami atau walinya jika ia masih kecil.
- b. Menjatuhkan talak dengan sengaja, artinya sengaja mengeluarkan kata dengan lafaz yang terang atau kinayah yang zahir walaupun ia tidak bermaksud untuk menamatkan

437. ¹³Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta, Pustaka Al-Khauhsar, 1996, Cetakan I), hal.

¹⁴Ibid., h. 347.

¹⁵Ibid., h. 347

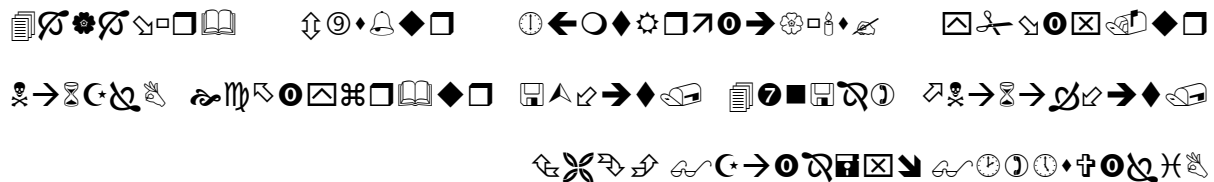
¹⁶Ibid.

hubungan perkawinan. Ini berpandukan kepada dalil bahwa sah talak suami yang menjatuhkan secara bergurau.¹⁷

C. Hukum Menjatuhkan Talak

Hidup dalam hubungan suami istri itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam. Akad sebuah perkawinan adalah untuk selamanya hidup bersama, agar suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman, supaya dalam perlindungan rumah tangga itu kedua suami istri dapat menikmati sisa hidupnya, serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpelihara, keturunan dengan sebaik-baiknya.¹⁸

Untuk itu, maka syariat Islam menjadikan pertalian antara suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kukuh sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Nisa' ayat 21 menyatakan :



Artinya: Dengan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.¹⁹

Oleh karena suami istri itu wajib memelihara institusi rumah tangga yang dibina tidak sepantasnya berusaha menolak dan memutuskan ikatan perkawinan tersebut meskipun menurut hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan terhadap kuasa talak dan karena itu pula maka suamilah yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan

¹⁷Ibid.

¹⁸Abd. Rahman , op.cit., h. 211

¹⁹Departemen Agama RI, op.cit., hal. 81

mengucapkan lafaz talak. Tetapi Islam tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu sesuka hati, apalagi hanya menuruti hawa nafsu semata-mata.

Untuk menghindari suami menggunakan haknya dengan sesuka hati atau sewenang-wenangnya dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya. Maka Islam membagi hukum kepada empat yaitu :²⁰

1. Haram, talak itu haram jika dengan talak itu kemudian suami curang, baik dengan istrinya maupun dengan wanita yang lain. Dengan kata lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan jatuhnya suami ke dalam perbuatan zina.
2. Makruh, talak menjadi makruh jika dilakukan tanpa sebab yang jelas. Hal ini berdasarkan hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan menurut syariat Islam, sedangkan Nabi saw menamakan halal (tidak haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan didalamnya yang mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunatkan, sehingga talak itu hukumnya makruh.²¹
3. Wajib, talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak kewajipan istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berkah menuntut talak dari suaminya, dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri tergantung tidak bertali dalam mendapatkan haknya.
4. Sunat, talak menjadi sunat hukumnya jika dilakukan karena istri rusak moralnya, berbuat zina, melanggar larangan-larangan agama seperti meninggalkan shalat, puasa dan sebagainya. Dalam hal istri yang berbuat zina atau bila yang demikian ini dipelihara terus

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islamiy wa addilatihi*, (Beirut : Dar Al-Fikr 1983) hal. 6879

²¹ Ibid., hal. 6880

akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami, tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.²²

D. Macam-Macam Talak

Dalam Islam talak terbagi kepada beberapa macam. Bila talak itu mutlak jatuh oleh karena suami, maka hanya terbagi dua yaitu *thalaq raj'i* dan *thalaq bain*. Bila talak itu datang dari seseorang istri disebut *khul'u* (talak tebus).²³ Berikut dijelaskan ketiga bentuk talak (*thalaq raj'i*, *thalaq bain* dan *khul'u*) tersebut.

1. Thalaq Raj'i

Para Ulama bersepakat bahwa yang dinamakan *thalaq raj'i* adalah talak si suami yang masih memiliki hak untuk kembali kepada istri, sepanjang istrinya masih dalam masa iddah, baik istri bersedia ataupun tidak. Syaratnya adalah istri itu sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai tetapi belum dicampuri tidak memiliki iddah. Syarat kedua adalah tidak menggunakan uang dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga. Wanita yang di talak *raj'i* hukumnya seperti istri. Mereka masih mempunyai hak sebagai suami istri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu dari keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa iddah.²⁴

Al-Siba'i mengatakan bahwa *thalaq raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah.²⁵

Thalaq ba'in ada dua macam:

²²Ibid,

²³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003, Cetakan I), hal. 130

²⁴Wahbah Zuhaili, *loc.cit*.

²⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Premena Jaya, 2006, Cetakan II), hal. 191.

1. *Thalaq Ba'in Shugra*

Thalaq ba'in shugra ialah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun masa iddahnya sudah berakhir.

2. *Thalaq Ba'in Kubra*

Thalaq ba'in ini yaitu yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. *Thalaq ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga.²⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230 :



Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²⁷

Menurut madzhab Imamiyyah dan pendapat Malik bin Anas, bila wanita itu ditalak sebanyak sembilan kali dan menikah dua kali dengan lelaki lain (*muhallil*), maka dia haram atas suami pertamanya untuk selamanya. Selain dari itu, menurut madzhab Imamiyyah, Syafi'i dan Hanafi, bila suami menalak istrinya tiga kali, lalu mantan istrinya tidak bertemu

²⁶Ibid, hal. 197

²⁷Departemen Agama RI, op.cit., hal. 36

dengannya selama beberapa waktu. Kemudian, dia mengaku telah menikah dan berpisah dengan suami keduanya dan telah menghabiskan masa iddah, maka pengakuannya diterima tanpa harus bersumpah. Bila suami pertama mempercayainya, dia bisa menikahinya kembali tanpa harus memeriksa kebenaran pengakuannya.²⁸

3. *Khul'u*

Secara etimologi (lughatan), kata *khul'u* berasal dari kata *khala'a* yang berarti untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya atau tuntutan penceraian dari pihak istri. Apabila suami istri tersebut menerima *khul'u* dan istri menyerahkan harta agar suaminya menalak istrinya. Menurut madzhab Imamaiyyah dan Syafi'i, bila tebusannya sama dengan mahar *mitsilnya*, maka sah hukumnya. Namun, bila jumlahnya lebih dari itu, maka lebihnya diambil dari sepertiga hartanya. Menurut madzhab Hanafi, *khul'u* itu sah dan suami bisa memiliki tebusan itu dengan syarat jumlahnya tidak melebihi sepertiga harta dan bagian warisannya. Dengan kata lain, suami mengambil jumlah paling sedikit di antara tebusan, bagian warisannya, dan sepertiga harta peninggalan istrinya. Sedangkan menurut madzhab Maliki, bila tebusannya sama dengan bagian warisan suami atau lebih sedikit, maka *khul'u* itu sah. Adapun menurut madzhab Hanbali, *khul'u* sah bila jumlah tebusannya sama dengan bagian warisan suami dari istrinya atau lebih

²⁸Muhammad Ibrahim Jannati, op.cit., halaman 559.

sedikit. Bila jumlah tebusannya lebih banyak, maka yang tidak sah hanya jumlah berlebih itu.²⁹

Madzhab Imamiyyah menambahkan syarat-syarat keabsahan wanita yang ditalak *khul'u* yaitu (1) Wanita berada dalam masa suci (dari haidh dan nifas) dan pada masa suci itu dia tidak dicampuri suaminya, (2) Wanita yang haidh jika dia hamil, wanita yang telah dicampuri jika dia menopause atau hamil, dan wanita telah berusia sembilan tahun, dan (3) Adanya dua saksi yang adil. Sedangkan madzhab lainnya, mensahkan *khul'u* dalam kondisi apapun yang dimiliki wanita yang meminta *khul'u*, seperti halnya mereka menghukumi hal yang sama berkaitan dengan wanita yang ditalak.³⁰

Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali membolehkan *shighat khul'u* diucapkan dengan kata yang jelas, seperti *khul'u* atau *faskh* atau *kinayah* (kiasan), seperti *bara'tuki* (Aku melepaskanmu) dan *abantuki* (Aku memisahkanmu). Madzhab Hanafi juga membolehkan menggunakan kata *al-bay'u* (penjualan) dan *al-syira'* (pembelian), misalnya suami berkata kepada isterinya, *bi'tuki nafsi bikadza* (Aku menjual diriku dengan sekian). Lalu istri berkata, *isytaraitu* (Aku membelinya), atau suami berkata demikian, *isyтари thalaqaki bikadza* (Belilah talakmu dengan sekian), dan isteri berkata, *qabiltu* (Aku terima).³¹ Demikian juga pendapat Syafi'i. Justru itu, *khul'u* tidak sah bila dilakukan hanya secara *mu'athah* (serah-terima tanpa shighat) yaitu dengan cara istri memberikan tebusan kepada suami dan berpisah tanpa keduanya mengucapkan *shighat* apapun.

Madzhab Hanafi membolehkan persyaratan *khul'u* atas hal lain (*ta'liq*), *khiyar* dan selang waktu antara pemberian tebusan dan *khul'u*. Maka, bila suami tidak ada dan mendengar bahwa istrinya meminta *khul'u* dan dia menerimanya, maka hukum *khul'u* sah. Madzhab

²⁹Ibid, hal. 567

³⁰Ibid, hal. 568

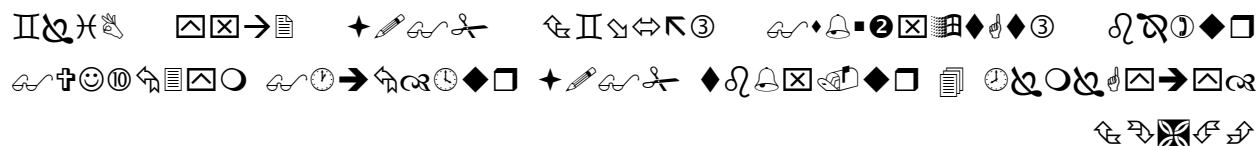
³¹Ibid, hal. 569

Maliki mendukung pendapat demikian, contoh *ta'liq* adalah bila misalnya suami berkata, Bila Abdullah datang dari haji, maka aku akan meng*khul'umu* dengan tebusan RM 1000, dan ketika Abdullah datang, si istri menerima *khul'u* tersebut. Menurut madzhab Hanbali, *khul'u* sah tanpa disertai niat selama *shighat*nya menggunakan kata yang jelas seperti *khul'u* atau *faskh*. Namun, mereka mensyaratkan pemberian tebusan dan akad *khul'unya* dilakukan dalam satu majlis. Mereka juga tidak membolehkan *ta'liq*. Sedangkan menurut madzhab Imamiyyah, *khul'u* tidak sah bila menggunakan kata kiasan (*kinayah*). Mereka hanya mensahkan *shighat* dengan kata *al-khul'u* dan *al-thalaq*. Keduanya bisa diucapkan sekaligus atau salah satu dari keduanya, misalnya, istri berkata, *badzaltu kadza lituthliqani*, (Aku serahkan sekian demi engkau menalakku), lalu suami berkata, *khala'tuki 'ala dzalika fanti thaliqun*, (Aku meng*khul'umu* atas hal itu maka engkau bercerai).³²

E. Hikmah Talak

Tujuan perkahwinan ialah kehidupan yang kontinuitas di antara kedua pasangan suami istri. Allah Swt mensyariatkan hukum-hukum dan adab-adab untuk melanggengkan dan menyemarakkan hubungan suami istri. Tetapi kadang-kadang adab dan hukum pasangan suami istri itu tergoda dan ternodai oleh bisikan hawa nafsu. Contohnya suami tidak memilih istri yang sesuai atau kedua pasangan atau salah seorang tidak cocok dengan adab-adab pergaulan yang telah ditentukan oleh Islam. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan, kerenggangan melabar dari hari ke hari sehingga sukar untuk diperbaiki. Ketika tidak ada cara lain untuk mewujudkan persefahaman dalam kehidupan keluarga, peraturan yang membolehkan menangani masalah tersebut diperlukan. Justru itu, ikatan perkawinan dapat didamaikan dan kedua belah pihak tidak terabaikan. Hal ini dilakukan apabila mereka tidak lagi mampu untuk hidup rukun, damai dan bersama. Allah Swt berfirman :

³²Ibid., hal. 570



Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.³³

Jika suami menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian terakhir dalam menyelesaikan masalah yang timbul, ia adalah jalan penyelesaian yang dharuri. Ia terpaksa melakukan walaupun penceraian itu amat menyakitkan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa hikmah dibolehkan talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dengan demikian talak dalam syariat Islam hanyalah untuk suatu tujuan mashlahat³⁴.

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan menyelamatkan suami istri atau kedua-duanya atau kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini, terkandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak.³⁵

1. Kemandulan, kalau seseorang laki-laki mandul maka ia tidak akan mempunyai keturunan atau anak, padahal anak merupakan keutamaan perkahwinan. Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul maka keberadabannya bersama suami akan mengeruhkan keadaan dan kejernihan rumahtangga. Maka talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul. Sebab yang mendorong untuk menikah adalah terwujudnya keturunan.
2. Terjadinya perbedaan dan karena kemarahan dan segala yang mengingkari cinta perkawinan di antara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah

³³Departemen Agama RI, op,cit., hal.

³⁴Amir Syarifuddin, op,cit., hal. 127

³⁵Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Fajar Interpretama Offset, 2003, Cetakan I), hal.192

pilar-pilar perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan permikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekelompokan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dari hati yang tidak bersatu, maka talak akan menghilangkan kesengsaraan.³⁶

³⁶Ibid hal.193.

BAB IV

PENYELESAIAN TALAK DI LUAR MAHKAMAH SYARIAH SERI MANJUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Bentuk-bentuk Talak di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung

Talak di luar Mahkamah dalam hal ini berarti talak yang dilafazkan oleh suami di luar sidang. Jelas bahwa di dalam Mahkamah Syariah Seri Manjung talak yang dilafazkan di luar Mahkamah merupakan suatu kesalahan. Talak di luar Mahkamah yang terjadi di Seri Manjung, Perak ada dalam beberapa bentuk. Islam menyediakan peraturan dan garis panduan untuk manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk bidang perkawinan untuk memastikan garis keturunan yang jelas. Tujuan panduan dan garis arahan ini adalah untuk memastikan kemaslahatan manusia dapat dipelihara dari segala unsur yang dapat merusak agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, terutama mempersiapkan keturunan yang lebih baik dan bertakwa. Allah Swt menjelaskan dalam surah *al-Nisâ'* ayat 9,



Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah (iman dan ekonomi), yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹

Kehadiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw, telah membuka lembaran baru dalam memimpin kehidupan manusia ke arah kebenaran berdasarkan ajaran Islam, terutama dalam bidang perkawinan (nikah) untuk menjelaskan garis keturunan yang legal, harmonis dan sejahtera (lahir dan batin).

¹Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hal.78

Islam telah mengkaji segala aspek kehidupan secara intensif dan memberikan solusi yang terbaik. Dalam ajaran Islam, perceraian baru menjadi solusi ketika pertikaian antara suami dan istri telah menguak kebencian memenuhi relung hati kedua belah pihak. Justru itu, Islam memilih perkara kerugiannya lebih sedikit dan bahayanya lebih ringan. Pada saat yang sama, ajaran Islam tidak melupakan nasib anak-anak mereka. Ajaran Islam menyerahkan masalah pengurusan anak-anak (*hadhânah*) kepada ibu kandung dan mewajibkan ayah untuk menafkahi mereka serta memberikan ganti atas jerih payah sang ibu saat mengurus anak-anak mereka, walaupun telah bercerai. Pensyariatan talak bila disimak secara seksama, paling kurang, dapat disimpulkan dalam tiga hal yaitu:

- (1) Bahwa kerukunan akan tercipta kembali di antara suami dan istri,
- (2) Bahwa kemarahan suami mereda (bila dia marah), dan
- (3) Peringatan serta pengajaran bagi kaum hawa yang emosional itu untuk tidak semena-mena terhadap suami. Sebab haramnya wanita bagi lelaki yang telah bercerai tiga kali adalah agar dia tidak main-main dengan perceraian, tidak memandang remeh wanita dan menyadari kesalahan dan kekeliruannya. Juga akan membuat suami dan istri putus asa untuk berkumpul kembali setelah tiga kali perceraian.

Ajaran Islam memperbolehkan laki-laki menjatuhkan talak sebagai terapi jika sudah ketika fikiran telah kacau dan hubungan suami istri telah rusak sedemikian parah, maka jalan terakhir untuk mengobatinya (seperti penyakit) adalah disuntik dengan obat yang cocok untuk penyakit itu. Tetapi talak tidak boleh dilakukan kecuali setelah berbagai macam terapi terlebih dahulu dicoba dan diupayakan dengan sungguh-sungguh, seperti memberi nasehat, meninggalkannya di tempat tidur (pisah ranjang), mendidik, memberi sanksi ringan dan setelah sedapat mungkin menanggung rasa benci dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak

disukainya, demi melaksanakan firman Allah Swt. (surah *al-Nisa'* ayat 9), artinya, Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²

Thalaq (talak dalam bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang halal dilakukan, tapi paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Swt. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw ;

ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه والحكم).³

Artinya, Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak (cerai). (H.R.Abu Dawud dan Ibnu Majah serta menshahihkannya al-Hakim).⁴ Hadits-hadits Rasulullah Saw yang senada dengan kebencian Allah terhadap orang mentalak istrinya itu antara lain, yang dikutip oleh Muhammad Ibrahim al-Jannati, adalah:

- (1), artinya, Sesuatu yang paling disukai Allah adalah rumah yang dihidupkan dengan tali pernikahan dan yang paling dibenci oleh-Nya adalah rumah yang dihancurkan dengan perpecahan yakni talak,
- (2), artinya, Allah menyukai rumah yang diisi dengan ikatan pernikahan dan membenci rumah yang berisi perceraian. Tiada sesuatu yang lebih dibenci Allah ketimbang perceraian,
- (3), artinya, Tiada perkara halal yang lebih dibenci oleh Allah ketimbang perceraian,
- (4), artinya, Sesungguhnya Allah membenci perceraian dan menyukai pembebasan budak, dan
- (5) artinya, Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Dia juga membenci orang yang bercerai dan orang yang cepat menikah dan cepat bercerai.⁵

²Ibid., hal. 78.

³Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Kairo: Dar Ihya' ahya' al-Turas al-'Araby, juz 3, 1960, hal.. 168.

⁴Ibnu Hajar al-Asqalani (773-852 H), *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Bandung, Indonesia, Syirkah Liththab,i wa al-Nasyr, t.t), hal. 246.

⁵Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqhi al-Muqarani*, penerjemah Ibnu Ali Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab ; Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi dan Ja'fari, Jilid III*, (Jakarta, Cahaya, Cetakan I, 2007), hal. 513.

Riwayat-riwayat hadits yang hampir senada disebutkan dalam berbagai sumber sunni dan syi'i, yang semuanya mengecam perceraian (*thalaq*) karena mengakibatkan kehancuran keluarga dan anak-anak yang menjadi jauh dari kasih sayang orang tua mereka. Perceraian suami istri akan merusak kehidupan sang anak, istri dan sangat berperan dalam mendorong mereka kepada keterasingan dan tindak kriminal. Fakta mengindikasikan bahwa sebagian pelaku tindak kriminal dan pelacuran (wanita menjadi pelacur atau perempuan penjaja dan penjual seks komersial/psk) berasal dari keluarga yang hancur karena perceraian. Anak-anak yang menjadi yang menjadi korban perceraian orang tua mereka, akan menghadapi banyak masalah sosial, ekonomi dan pendidikan dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka akan cenderung kepada tindak criminal karena terlantar dijalan. Bencana tidak hanya menimpa mereka sendiri, tapi juga sebagian lapisan masyarakat.

Janji sehidup semati suami istri mungkin hanya berlaku dalam agama Kristen Katolik. Menurut Kristen Katolik, suami istri tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Islam membolehkan talak kalau pasangan suami istri sudah tidak mampu lagi mempertahankan keharmonisan dan kebahagiaan bahtera rumah tangga. Ia berlaku apabila terjadi pergolakan dalam rumah tangga yang tidak ada suatu perkawinan.⁶

Berdasarkan penelitian penulis jelas disini menunjukkan bahwa, penjatuhan talak di luar sidang Mahkamah Syariah masih tetap terjadi di tengah-tengah masyarakat Seri Manjung Perak. Penyebabnya adalah dari kedua belah pihak suami dan istri yang melakukan *nusyûz* (mengabaikan kewajiban dan melakukan maksiat) dan karena *syiqâq* (pertengkaran). Dilihat dari lafaz yang diucapkan suami untuk mentalak istrinya, ada dua bentuk talak yang dilafazkan oleh pasangan suami yaitu:

⁶Mohd Naim Haji Mokhtar, *Talak ; Konsep dan Perlaksanaan Di Mahkamah Syariah Jabatan Undang-Undang Islam, Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim*, (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2000), hal. 136

- (1) *Sharîh* (secara nyata dan tegas untuk menceraikan istrinya),
- (2) *Kinâyah* atau *isyârat* (dengan sindiran atau isyarat yang menunjukkan perpisahan).

Dan ada juga yang merujuk kembali setelah bercerai di luar Mahkamah sebagaimana dalam hadis:

عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ، ثم يقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال : طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.

Dari Imran bin Hushain: Ia ditanya tentang suami yang menthalak istrinya, tetapi kemudian langsung menggaulinya tanpa ada saksi dalam menthalaknya dan rujuknya. Ia menjawab Engkau menthalak dan merujuk tidak berdasar pada Sunnah Nabi, maka jadikanlah persaksian atas penthalakan dan rujuk kepada sang istri dan jangan ulangi lagi” (Shahih Abu Daud).

Dari Kasus yang peneliti amati:

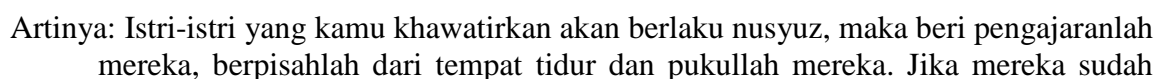
1. Abdil Shakri Bin Ahmad suami kepada Hayati Binti Johari telah bercerai pada tanggal 3 Juli 2008 di luar Mahkamah bertempat di Lot 1-5, Persiaran Venice Sutera 1, Desa Manjung Raya, Lumut, Perak. Didaftarkan dan disahkan oleh Mahkamah Syariah Seri Manjung pada tanggal 28.08.2008. Pasangan suami istri ini bercerai dengan lafaz *kinayah* (Kalau kau keluar dari rumah ini, jatuh talak satu). Pasangan ini telah rujuk semula pada tanggal 10 September 2008.
2. Hamdan Bin Sha’aban suami kepada Ponisah Binti Kasbiran bercerai pada tanggal 15.02.2004 menggunakan lafaz *Shorih*, bertempat di No. 46 Taman Samudera, 32040 seri Manjung, Perak. Bahwa Hamdan melakukan talak dengan tidak mematuhi kehendak Seksyen 51 A (1) UUKI.PK. 1984. Yang mana bisa diambil tindakan mengikut Seksyen 120 UUKI.PK. 1984 yaitu melafazkan talak dengan menghubungi istrinya ”Abang ceraikan umi dengan talak 1”.

Walaupun hukum telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang untuk mencegah agar talak itu tidak dijatuhkan hanya di dalam rumah sendiri. Namun kesadaran sebagian anggota masyarakat Seri Manjung khususnya tentang pentingnya persoalan talak dijatuhkan di depan sidang Mahkamah Syariah masih dalam tahap yang rendah, jika diteliti secara ilmiah, penulis mendapati sumber utamanya ialah pada pihak yang berwenang (Mahkamah Syariah) belum mengadakan pendekatan sosialisasi maksimal tentang permasalahan ini kepada seluruh anggota masyarakat yang akan melakukan pernikahan dan belum maksimalnya upaya pembinaan rumah tangga bahagia melalui suatu program yang terencana dan berkesinambungan.

Di samping tidak prihatinnya sebagian anggota keluarga Seri Manjung tentang Undang-Undang terutama dalam persoalan penjatuhan talak di luar Mahkamah Syariah yang jelas akan merugikan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk melanjutkan kehidupan pasca perceraian (talak). Namun dalam mencari solusi terbaik dalam masalah ini pihak yang berwenang perlu bijak di dalam memberikan dan menerangkan kepentingan Undang-Undang dan Hukum Negara dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat agar lebih memahami makna dan manfaat Undang-Undang perkawinan dan hukum keluarga, khususnya tentang talak di luar Mahkamah Syariah di Seri Manjung.

Selain penjelasan di atas, setiap individu perlu memahami aturan Islam kenapa sebagian anggota masyarakat selalu digembar-gemburkan dengan kelemahan Peradilan Agama dalam membicarakan sesuatu kasus, terutama yang berkaitan dengan prosedur dan penyelesaian talak di Mahkamah Syariah Seri Manjung. Ada pula yang beranggapan mahkamah ini menyusahkan kaum wanita khususnya dalam kasus perceraian terutama yang terkandung di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam bagi setiap negeri memang sukar difahami

Kewajiban istri terhadap suami, terutama adalah berkata lemah lembut dan tidak kasar, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama hal itu tidak menyalahi ajaran agama Islam, minta izin kepada suami sewaktu akan bepergian keluar rumah, menjaga suami dan harta kekayaannya. Nusyuz itu hukumnya haram, karena menyalahi ketentuan ajaran Islam melalui al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Dalam kaitannya dengan Allah Swt pelakunya diganjar dengan dosa oleh Allah dan dalam kaitannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan rumah tangga suami istri. Atas perbuatannya itu si istri mendapat sanksi di antaranya adalah gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu. Walaupun demikian, pelaku nusyuz itu tidak memutus ikatan perkawinan suami istri. Tiga cara yang ditetapkan Allah Swt menghadapi pelaku nusyuznya seorang istri, sebagaimana dinyatakan-Nya di dalam surah al-Nisa` ayat 34,



menta'atimu, janganlah kamu cari-cari jalan atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar.⁷

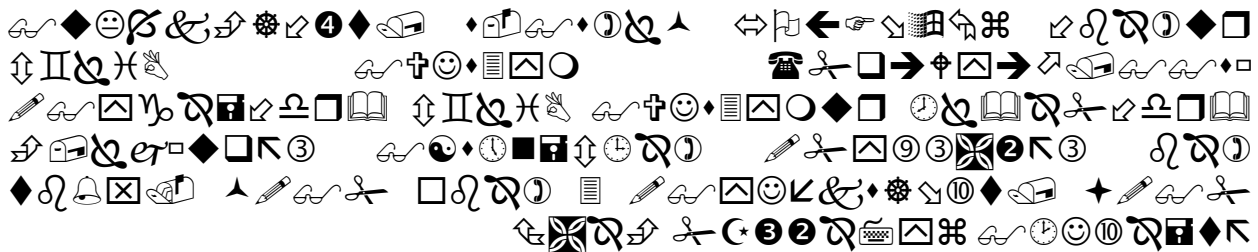
Secara kronologis ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam menghadapi istri nusyuz menurut ayat tersebut di atas yaitu :

- (a) Bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan melakukan nusyuz, suami harus memberikan nasihat, pengajaran dan peringatan kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah keliru, menyimpang dan salah menurut aturan ajaran agama Islam dan akan menimbulkan risiko ia dapat kehilangan haknya sebagai istri yang sah menurut ajaran agama Islam. Bila dengan nasihat yang baik itu si istri tidak peduli, maka masalahnya telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi.
- (b) Bila istri tidak memperlihatkan tanda-tanda perubahan dan perbaikan sikap dan memang realitasnya nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha tahap kedua yaitu harus berpisah tempat tidur (menghentikan hubungan seksual). Hijrah dalam ayat di atas juga berarti mengabaikan komunikasi lisan dengan pihak istri. Bila cara ini yang ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari. Bila dengan metode pisah ranjang ini istri telah kembali taat, persoalannya telah selesai.
- (c) Bila dengan pisah ranjang istri belum juga memperlihatkan ada perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan tetap dalam kondisi nusyuz, maka menurut ayat tersebut suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak boleh menimbulkan cedera. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk *ta'dib* (edukatif), bukan dengan marah dan benci. Suami sangat dilarang memukul istrinya dengan

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hal. 84.

pukulan yang menyakiti. Bila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali kepada patuh, maka masalahnya telah dapat diatasi dengan baik.

Syiqâq adalah pertengkaran, kata ini dihubungkan dengan suami istri, sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak yang sedang terjadi kemelut rumah tangga. *Syiqâq* muncul bila suami atau istri atau dari keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini, Allah Swt memberi petunjuk jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui firman-Nya surah al-Nisa` ayat 35:



Artinya: Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran di antara suami istri, maka utuslah seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri. Bila keduanya menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberi *taufiq* di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memperhatikan.⁸

Hakam dalam ayat tersebut di atas adalah seorang bijak dan arif yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. Paling kurang ada dua langkah yang harus dihadapi oleh hakam dalam menyelesaikan konflik suami istri, yaitu:

- (a) Hakim mempelajari dan meneliti sebab musabbab terjadinya konflik keluarga tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuznya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz di atas. Bila ternyata sebab konflik berasal dari nusyuznya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya, sebab bila

⁸Ibid, hal. 66.

berbuat kekerasan dalam rumah tangga, akan melanggar aturan Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kalau sebab konflik muncul dari kedua belah pihak dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk memberi nasihat kepada kedua suami istri agar bisa sadar,

- (b) Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil yang baik dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin meruncing, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas bersama-sama menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya diberi tugas dan wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang retak dan hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin, menceraikan keduanya, tergantung kepada hasil kajian intensif keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti. Dalam ayat tersebut, memang tidak disebutkan kedua orang hakim itu tidak dipersyaratkan dari pihak keluarga kedua belah pihak, namun, sebaiknya bila keduanya dari pihak keluarga, karena dianggap lebih akrab dan lebih sayang serta lebih mengetahui persoalan yang sebenarnya dibandingkan dengan orang lain. Inti tugas hakim adalah mencari jalan damai sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindari. Namun, bila menurut pandangan kedua hakim tidak ada cara lain kecuali cerai, maka keduanya dapat menempuh jalan terakhir itu.

Dari cara dan usaha antisipasi di atas jelaslah bahwa Allah Swt menghendaki adanya upaya keras untuk mencegah terjadinya perceraian antara suami istri. Namun, bila tidak ditemukan kemungkinan lain dengan segala upaya yang telah ditempuh, maka perceraian dapat dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam.

B. Prosedur Talak di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung

Prosedur berasal dari kata bahasa Inggris *procedure* adalah suatu rangkaian tindakan yang ditetapkan lebih dahulu yang harus dilalui untuk mengerjakan suatu tugas. Prosedur itu adalah suatu kombinasi dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan yang disusun dalam suatu urutan yang logis agar dapat mencapai tujuannya dengan cara seekonomis-ekonomisnya. Suatu prosedur menetapkan tindakan apa yang diperlukan, siapa yang harus melaksanakannya dan kapan pelaksanaan tersebut harus dilakukan. Esensinya adalah urutan kronologis. Prosedur juga suatu alat untuk menyampaikan keputusan kebijaksanaan yang diterapkan kepada bidang-bidang operasi rutin dan repetitif. Kadang-kadang juga disebut tatacara.⁹

Setelah menjatuhkan talak, bekas suami harus menunaikan tanggung jawab dan kewajiban terhadap mantan istri dan anaknya, kalau punya anak. Justru itu, bekas suami, di antaranya, harus melunasi mahar yang belum dibayar (karena nikah dengan mahar secara hutang atau tidak dengan tunai), memberi nafkah wajib selama masa *iddah*, memberi upah penyusuan anak dan nafkah mereka hingga dewasa dan memberi *mut'ah* (pemberian suami ke atas isteri selama menjadi istri karena melayani suami dengan baik). Setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian harta benda). Alasan mereka adalah keumuman firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 241 ; artinya, Kepada para wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.¹⁰ Besarnya *mut'ah* berbeda menurut zaman dan lingkungan, termasuk menurut kondisi suami.¹¹

⁹Komaruddin, *Ensiklopedi Menegemen*, (Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan I, Januari 1994), hal. 702.

¹⁰H.Abdullah Sukarta, Ketua Lajnah Pentashih Mushhaf al-Qur'an, dkk, *op.cit.*, hal. 31.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, penerjemah As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, Cetakan III, Jilid II, Sya'ban 1420 H/November 1999 M), hal. 506.

Dalam kaitan dengan *nikah mut'ah*, fuqaha sepakat bahwa *nikah mut'ah* dibolehkan pada masa Nabi Muhammad Saw, Abukabar dan akhir masa pemerintahan Umar ibnu al-Khaththab. Namun, mereka berselisih dalam masalah penghapusan hukumnya. Madzhab Imamiyyah berpendapat bahwa *nikah mut'ah* masih dibolehkan, sedangkan menurut fuqaha Sunni, Zaidiyyah dan Ismailiyyah, bahwa halalnya *nikah mut'ah* telah dihapuskan. *Nikah mut'ah* adalah pernikahan seorang wanita berakal dan berikhtiar dengan seorang pria muslim, dengan mahar tertentu (seperti dalam *nikah da'im*, mahar dalam *nikah mut'ah* tidak ada batasan sedikit banyaknya), selama masa tertentu (disebutkan secara jelas masa nikahnya dalam akad). Dalam *nikah da'im* wanita yang diceraikan beriddah selama tiga bulan atau tiga kali haidh, sedangkan dalam *nikah mut'ah* wanita beriddah selama dua kali haidh atau 40 hari. Anak hasil dari *nikah mut'ah* adalah anak *syar'i* dan memiliki hak yang sama seperti anak hasil dari *nikah da'im*. Istri *nikah mut'ah* tidak mewarisi harta benda suaminya dan sang suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Namun, bila dalam akad *nikah* disyaratkan warisan dan nafkah, maka dia seperti istri dalam *nikah da'im*. Tidak ada talak dalam *nikah mut'ah*. Suami istri dalam *nikah mut'ah* berpisah bila masanya telah berakhir atau suaminya menghibahkan masa yang tersisa kepada istrinya.¹²

Umar ibnu al-Khaththab mengharamkan *nikah mut'ah* dengan ucapannya, Dua *mut'ah* yang dahulu dihalalkan di zaman Rasulullah Saw, sekarang aku haramkan dan pelakunya akan kuhukum. Keduanya adalah *mut'ah* wanita (*nikah mut'ah*) dan *mut'ah* haji (*haji tamattu'*).¹³ Beliau juga berkata, Bila ada seorang pria yang menikah dengan seorang wanita

¹²Muhammad Ibrahim Jannati, op.cit., hal. 466.

¹³*Haji tamattu'* adalah bila seseorang berniat melakukan ihram pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah, dari berbagai miqat (Masjid al-Syajarah, Juhfah, Qarnu al-manazili, Yalamlam, Wadi al-'aqiq, dllnya), kemudian pergi ke Makkah, melakukan thawaf, shalat dua rakaat, sa'i antara Shafa dan Marwa', mencukur rambut, lalu melepas ihramnya. Lalu, ia kembali melakukan ihram untuk haji dari Makkah, kemudian pergi ke 'Arafah dan wuquf di sana mulai dari awal zhuhur tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari. Lalu, ia pergi ke Masy'aril haram dari waktu fajar tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbitnya matahari dan pergi ke Mina sampai

untuk batas waktu tertentu (*ilâ ajalin musammâ*), niscaya aku akan merajamnya. Bila dia sudah mati, maka aku akan merajam kuburnya.¹⁴ Penulis setuju dan mendukung pendapat Umar ibnu al-Khaththab dan Mahmud Syalthut yang menolak dan mengharamkan nikah mut'ah. Mahmud Syalthut menjelaskan bahwa nikah mut'ah atau yang juga disebut dengan nikah sementara, adalah bila seorang pria dan wanita tak bersuami untuk tinggal bersama, baik masanya ditentukan atau tidak, dengan mahar yang telah ditentukan. Tujuan nikah seperti ini, hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, menurutkan hawa nafsu dan berakhir dengan tanpa talak ketika masanya berakhir, atau dengan keduanya berpisah, bila mereka tidak menentukan masanya pada saat akad nikah. Tidak diragukan, nikah ini (mut'ah) tidak termasuk pernikahan yang disyariatkan dalam Islam dan al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan bahwa asas pernikahan adalah rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddatan wa rahmatan*) antara suami dan istri. Buah dari perpaduan kasih sayang ini adalah terbentuknya keluarga, kelahiran dan cucu dan kerja sama dalam mendidik mereka. Betapa jauhnya, nikah mut'ah dari asas dan buah semacam ini. Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan seperti waris, nasab, talak dan haramnya istri kelima dan hukum-hukum lain yang telah diketahui oleh sebagian fuqaha.¹⁵ Idzin Rasulullah Saw untuk melakukan nikah mut'ah tidak lebih dari mengidzinkan suatu perbuatan yang haramnya lebih ringan di saat darurat dan masa-masa awal pengenalan Islam. Idzin semacam ini tidak bisa dijadikan dalil untuk keabsahan nikah mut'ah. Syariat yang membolehkan seseorang wanita menikah dengan 11 pria dalam setahun dan membolehkan seorang pria menikahi setiap wanita yang

menyelesaikan amalan-amalan haji. Setelah melakukan semua ibadah ini, ia telah melakukan haji tamattu'. Dinamakan demikian, karena di dalamnya ada mut'ah (bersenang-senang) disebabkan halalnya hal-hal yang diharamkan waktu ihram pada selang waktu antara dua ihram. Ibid., hal. 487.

¹⁴Ibid., hal. 476.

¹⁵Mahmud Syalthut, *al-Fatwa*, hal. 273.

diinginkannya, bukan syariat yang berasal dari Allah Swt, juga bukan sebuah syariat yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian, pria dan perempuan.

Dari 11 orang yang mengajukan Kertas Pertuduhan (Charge sheet) sejak tanggal 18 Mei 1988 sampai dengan tanggal 25 Maret 2008, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nama : *Mohammad Said bin Mat Lazim*, K/P (Kertas Pertuduhan) : 421108-08-5743, dan umur : 62 tahun yang beralamat di Kg. Dendang, 2700 Beruas, Perak. Bahwa kamu pada tanggal 18 Mei 1988, lebih kurang jam 03.00 petang di Pusing (Ipoh, Perak) telah menceraikan istri kamu bernama *Salbiah binti Yeop Isa*, K/P : 2084784, tanpa mengikuti peraturan Bahagian II Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984, dengan itu kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai tanpa kebenaran Hakim dan di luar Mahkamah di bawah Seksyen 119 Undang-Undang Keluarga Islam Perak.
2. Nama : *Ghazali bin Basri*, K/P : 4696820, dan umur : 48 tahun yang beralamat di nomor 560, Kuarters Klinik Kesihatan, 34900 Pantai Remis, Perak. Bahwa kamu pada penghujung tahun 1991 lebih kurang jam 09.30 malam di sebuah rumah nomor 560, Kuarters Klinik Kesihatan, 34900 Pantai Remis (Perak) didapati telah menceraikan istri kamu bernama *Rossita binti Mohammad Ali*, K/P : 650320-10-6790. Dengan itu, kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai tanpa kebenaran hakim dan di luar Mahkamah di bawah Seksyen 119 Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984.
3. Nama : *Rosnizal bin Dahalan*, K/P : 760402-01-6681, dan umur : 26 tahun yang beralamat di nomor 131, Taman Sri Lekir, Batu 7 Lekir, 32020 Lekir, Sitiawan, Perak. Bahwa kamu pada tanggal 14 Februari 2002, lebih kurang jam 09.45 malam, di Blok A 12, Bilik 505, TLDM, Lumut (Perak) didapati telah menceraikan istri kamu bernama *Habibah binti Abu Bakar*, K/P : 801012-11-5316. Dengan itu, kamu dituduh melakukan

kesalahan bercerai tanpa kebenaran Hakim dan di luar Mahkamah di bawah Seksyen 119 Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984.

4. Nama : *Mohammad Hisham bin Abas*, K/P : 690514-08-6237, dan umur : 35 tahun yang beralamat di Batu 16, 32400 Ayer Tawar, Perak. Bahwa kamu pada bulan April 2002, lebih kurang jam 08.30 malam, di sebuah rumah Kg. Alor Bakat, Melor (Kelantan), didapati telah menceraikan istri kamu bernama *Sabariah binti Che Ahmad*, K/P : 721121-03-5294. Dengan itu, kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai tanpa kebenaran Hakim dan di luar Mahkamah di bawah Seksyen Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984.
5. Nama : *Zamzuri bin Kamal Hizat*, K/P : 680817-08-5523 dan umur : 35 tahun yang beralamat di nomor 22, Kg. Gunung Tunggal, 32600 Changkat Keruing, Perak. Bahwa kamu pada tanggal 07 Agustus 2003, lebih kurang jam 08.00 malam, bertempat di sebuah rumah nomor 22, Kg. Gunung Tunggal, 32600 Changkat Keruing, Perak. Didapati menceraikan istri kamu bernama *Noraina binti Yusof*, K/P : A 2922382. Dengan itu, kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah yang boleh dihukum di bawah Seksyen 119 Enakmen Keluarga Islam Perak 1984.
6. Nama : *Mohammad Tajul al-'Aurus bin Sudin*, K/P : 710304-01-6113 dan umur : 32 tahun yang beralamat di Public Bank Berhad, Cawangan Pandan Jaya, 55100 Cheras, Kuala Lumpur. Bahwa kamu pada tanggal 12 Agustus 2003, lebih kurang jam 12 malam, di sebuah rumah Blok AE-1-16, Taman Pandan Indah, 55100, Pandan Indah, Kuala Lumpur, didapati telah menceraikan isteri kamu bernama *Nor Farani binti Mohammad Nor*, K/P : 710916-08-5670. Dengan itu, kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai

tanpa kebenaran Hakim dan di luar Mahkamah di bawah Seksyen 119 Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984.

7. Nama : *Mohammad Roslan bin Abd. Razak*, K/P : 4683120 dan umur : 50 tahun yang beralamat di nomor 296, Kg, Masjid, 32300 Pangkor (Perak). Bahwa kamu pada tanggal 05 Januari 2003, lebih kurang jam 05.30 petang, di alamat nomor 296, Kg. masjid, 32300 Pangkor (Perak) telah menceraikan istri kamu bernama *Khodijah binti Hj. Said*, K/P : 530610-08-6170, tanpa mengikut peraturan Bagian II Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984, dengan itu, kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai tanpa kebenaran Hakim dan di luar Mahkamah di bawah Seksyen 119 Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984.
8. Nama : *Ismail bin Mohd. Yatim*, K/P : 3835487 dan umur : 54 tahun yang beralamat di nomor 69, Kg. Teluk Penchalang, Pasir Panjang Laut, 32040 Seri Manjung (Perak). Bahwa kamu pada tanggal 04 Januari 2004, lebih kurang jam 03.30 petang di alamat nomor 69, Kg. Teluk Penchalang, Pasir Panjang Laut, 32040 Seri Manjung (Perak) telah menceraikan istri kamu bernama *Mazuin binti Mansor*, K/P : 580912-08-5144, tanpa mengikut peraturan Bahagian II Undang-Undang keluarga Islam Perak 1984, dengan itu, kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai tanpa kebenaran Hakim dan di luar Mahkamah di bawah Seksyen 119 Undang-Undang keluarga Islam Perak 1984.
9. Nama : *Kamarul Zaman bin Masery*, K/P : T 819951 dan umur : 30 tahun yang beralamat di KD Malaya, pangkalan TLDM, 32100 Lumut (Perak). Bahwa kamu pada tanggal 07 Februari 2004, bertempat di A9, Unit 603, RK TLDM, 32100 Lumut (Perak), telah menceraikan istri kamu bernama *Noridah binti Basari*, K/P : 750522-01-5310, tanpa mengikut peraturan Bahagian II Undang-Undang keluarga Islam Perak 1984, dengan itu,

kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai tanpa kebenaran Hakim dan di luar Mahkamah di bawah Seksyen 119 Undang-Undang keluarga Islam Perak 1984.

10. Nama : *Syed Muhammad Affan bin Ambo*, K/P : T 824219 dan umur 25 tahun yang beralamat di Blok A8, Unit 701, RK TLDM, 32100 Lumut (Perak). Bahwa kamu pada tanggal 25 Desember 2004, lebih kurang jam 11 pagi, di sebuah rumah Blok A8, Unit 701, RK TLDM, 32100 Lumut (Perak), didapati telah menceraikan istri kamu bernama *Noor Fadhilah binti Jangga*, K/P : 790111-08-5510. Dengan itu, kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai tanpa kebenaran Hakim di luar Mahkamah di bawah Seksyen 119 Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984.

11. Nama : *Razak bin Ali*, K/P : 630316-05-5839 dan umur 43 tahun yang beralamat di nomor 22, Taman Sri Selamat, Jalan Kg. Selamat, 32000 Sitiawan (Perak). Bahwa kamu pada tanggal 25 Maret 2008, selepas waktu maghrib di rumah yang berlamat nomor 22, Taman Sri Selamat, Jalan Kg. Selamat, 32000 sitiawan (Perak) telah menceraikan istri kamu bernama *Ismawati binti Suleiman*, K/P : 730204-07-536. Dengan itu, kamu dituduh melakukan kesalahan bercerai di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah dan boleh dihukum di bawah Seksyen 125 Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 (selengkapnya kertas pertuduhan dapat dilihat dalam lampiran).

Prosedur talak di depan Sidang Pengadilan Syariah Seri Manjung Perak khususnya, dapat disimak pada Enakmen 144 dan 119 dan dalam Enakmen 44e ayat 1. Enakmen ini menjelaskan tentang permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah Syariah terhadap suami istri yang ingin bercerai, harus terlebih dahulu ;

(1) Mengajukan permohonan untuk bercerai kepada Mahkamah Syariah dalam formulir yang disertai dengan suatu pengakuan mengenai perceraian yang akan dilakukan.

(2) Sementara Enakmen 119 menjelaskan mengenai perceraian di luar Mahkamah Syariah dan tanpa persetujuan peradilan, jika laki-laki (suami) menceraikan isterinya dengan melafazkan dengan bentuk apa saja di luar sidang Mahkamah Syariah (tanpa pengakuan Mahkamah Syariah), maka laki-laki (suami) itu telah melakukan suatu kesalahan, karena bercerai di luar Mahkamah Syariah dan dalam masa tujuh hari setelah talak itu dilafazkan di luar Mahkamah Syariah.

(3) Pihak-pihak yang berkewajiban (istri atau saksi-saksi yang mengetahui perceraian ini) melaporkan perceraian itu (perbuatan) itu kepada Mahkamah. Perbuatan itu merupakan suatu kesalahan dan akan disanksi tidak melebihi tiga ribu ringgit Malaysia (RM 3000) atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya (sanksi dan dipenjara), jika terbukti melakukan kesalahan.

Walaupun aturan Undang-Undang telah diadakan, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, talak di luar Mahkamah sering juga dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. Lazimnya talak bermula dari adanya pertengkaran, perselisihan faham atau pergaduhan yang berlaku di luar kawalan fikiran yang sehat dimana suami di bawah kontrol akal sehat, karena marah menjatuhkan ucapan talak terhadap istrinya. Kebanyakan isteri yang diceraikan di luar Mahkamah ditinggalkan oleh suaminya tanpa tanggung jawab moral dan material. Apabila terjadi demikian, pihak isteri sukar untuk membuktikan perkara yang diajukan ke Mahkamah Syariah dan ditambah lagi pihak suami jelas tidak mau memberi kerjasama yang baik.

Untuk memastikan roh dan semangat perceraian yang dibenarkan oleh Islam itu dapat dilaksanakan dengan ma'ruf, maka hampir keseluruhan Akta/Enakmen Undang-Undang keluarga Islam Negeri-Negeri di Malaysia telah memperuntukkan satu seksyen khas

berkenaan permohonan perceraian, sebagai contoh, seksyen 44 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak 1984 (Pindaan/Penjelasan 1992) menjelaskan dengan terperinci prosedur-prosedur yang perlu diikuti oleh pihak-pihak yang ingin memohon cerai seperti berikut :

1. Seseorang suami atau istri yang hendak bercerai hendaklah mengajukan permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah, dalam borang yang telah ditetapkan, disertai dengan suatu pengakuan yang sah dan mengandung :

- (a) Butir-butir (rincian) mengenai perkawinan itu, nama, umur dan anak-anak, jika ada hasil dari perkawinan itu.
- (b) Butir-butir (rincian) mengenai fakta-fakta yang memberi bidang kuasa kepada Mahkamah di bawah seksyen 42.
- (c) Butir-butir (rincian) mengenai segala prosiding yang dahulu mengenai hal-ihwal suami-istri antara pihak-pihak itu, termasuk pihak prosiding itu.
- (d) Suatu pernyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai.
- (e) Suatu pernyataan tentang sama ada apa-apa (alasan perceraian), dan jika ada, apakah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai perdamaian.
- (f) Syarat-syarat perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anak dari perkawinan itu, jika ada, peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkawinan itu, jika ada, pembagian segala aset yang diperoleh melalui usaha dari pihak-pihak itu, jika ada, atau, jika tiada sesuatu persetujuan tersebut telah tercapai, cadangan pemohon mengenai hal-hal itu, dan
- (g) Butir-butir (rincian) mengenai perintah yang diminta.¹⁶

¹⁶Badan Perundangan Negeri, *Enakmen Undang-Undang Negeri Perak tahun 1984*, (Pindaan/ Penjelasan 1992, Perak), hal. 24.

𐀀𐀁𐀂𐀃 𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽

C. Penyelesaian Talak di Luar Mahkamah Syariah

1. Penyelesaian Talak di Luar Mahkamah Syariah Seri Manjung Dalam Perspektif Hukum

¹⁷Abdullah Sukarta, Ketua Lajnah Pentashih Mushhaf al-Qur'an, dkk., *op.cit.*, hal. 28.

materi), Persoalan talak di depan Sidang Negeri Perak diatur di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak tahun 1984 (Pindaan/Penjelasan 1992).

Talak sebagai sebagian dari daripada sistem perkawinan dalam ajaran Islam dalam Undang-Undang Islam Seri Manjung, Perak dan telah diakui oleh Sistem Perundangan Negara. Penyelesaian talak di luar Mahkamah menurut aturan Enakmen keluarga Islam Perak adalah:

1. Perceraian dianggap tidak sah jika terjadi perceraian di luar Mahkamah, harus diulang mengadap Mahkamah (di depan sidang) untuk melafazkan talak (diakui qadhi dan saksi-saksi) dan diberi surat cerai.
2. Sesudah perceraian itu disahkan oleh Mahkamah Syariah Seri Manjung, maka bagi suami yang melafazkan talak di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah (tanpa izin) dikenakan denda sebanyak RM 3000.
3. Sekiranya suami yang melafazkan talak tidak mampu membayar denda RM 3000, maka dia harus menjalani sanksi penjara selama dua tahun.
4. Dalam kenyataan yang berlaku dalam sidang terhadap penyelesaian kasus-kasus perceraian di luar Mahkamah, Hakim dapat memberikan Pertimbangan dan keringanan kepada suami yang melafazkan talak di luar Mahkamah atas alasan-alasan yang boleh diterima.¹⁸

Menurut Undang-Undang Hukum Islam Perak tahun 1984 (Pindaan/Penjelasan 1992) Seksyen (Fasal) 51 A, mengenai perceraian di luar Mahkamah tentang pengesahan dijelaskan bahwa Pengesahan kedua lafaz ; *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) sekiranya di luar Mahkamah perlu kepada keputusan dan pengesahan Hakim Syar'i. Oleh sebab itu, dibuat

¹⁸ Ahmad Bin Jazman, (Hakim Mahkamah Rendah Seri Manjung, Perak), *Wawancara*, tanggal 10 Maret 2009.

aturan di bawah Seksyen 52 A untuk memberi waktu kepada suami dalam masa tujuh hari selepas talak dilafazkan dan harus melaporkan lafaz itu kepada Mahkamah Syari'ah. Mahkamah hendaklah mengadakan pembicaraan dari laporan yang diterima itu dan Hakim Syar'i berkewajiban memastikan talak itu telah dilafazkan dengan sah menurut hukum syara'.

2. Prosedur Talak di Luar Mahkamah

Talak di luar Mahkamah menurut aturan Enakmen Keluarga Islam Perak antara lain dijelaskan bahwa Perceraian dianggap tidak sah jika terjadi perceraian di luar Mahkamah, harus diulang menghadap Mahkamah (di depan sidang) untuk melafazkan talak (diakui qadhi dan saksi-saksi) dan diberi surat cerai. Tampaknya tidak jauh berbeda dengan *Kompilasi Hukum Islam* Indonesia, BAB XVI, Bagian Kedua, Tata Cara Perceraian, pasal 129, 130 dan 131, ayat 1 sampai dengan 5. Dalam pasal 129, dijelaskan bahwa seorang suami yang akan menajuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam pasal 131 ayat 1 sampai dengan 5 dijelaskan ;

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang berangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang idzin bagi suami untuk megikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan Sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempoh 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang idzin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang utuh.

- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.¹⁹

Enakmen Keluarga Islam (Perak) mengatur dalam bagian IX, fasal 125 tentang penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah :

Mana-mana lelaki yang menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.²⁰

Kasus-kasus perceraian di luar Mahkamah masih terjadi di Seri Manjung yang akhirnya mereka harus mendaftarkan diri di Mahkamah Rendah Syariah Seri Manjung dan dikenakan denda bagi suami yang melafazkan talak di luar Mahkamah. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus berikut :

1. Zamzuri Bin Kamal Hizat dan Noraina Binti Yusof bercerai di luar Mahkamah pada tanggal 07.08.2003 jam 8.00 malam bertempat di sebuah rumah, No.22, Kampung Gunung Tunggul, 32600 Changkat Keruing, Perak, didaftarkan di Mahkamah pada tanggal 19.05.2008, setelah 21 hari dari tanggal didaftarkan, kasus ini disidangkan pada tanggal 10.06.2008, maka hasil dari sidang yang berlangsung, hakim menyuruh suami melafazkan talak kali kedua mengikut hukum syarak dan seksyen 57 EKI.2004 di depan sidang. Setelah itu denda dikenakan sebanyak RM2000 ke atas kesalahan suami (Zamzuri) karena melafazkan talak di luar Mahkamah.

¹⁹Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, Cetakan I, Agustus 2005), hal. 42 dan 43.

²⁰Perak, *Enakmen Keluarga Islam*, (Perak, 2004), hal. 470.

2. Samsudin Bin Ahmad dan Hasnah Binti Mat Zin bercerai di luar Mahkamah pada tanggal 10.11.2008 bertempat Rumah, No. 107 B, Ladang Sungai Wangi, 32000 Sitiawan, Perak. Pada tanggal 12.11.2008 kasus ini didaftarkan dan tanggal 19.01.2009 kasus ini disidangkan maka, Hakim meminta suami melafazkan talak kali kedua di depan sidang dan hakim menjatuhkan denda sebanyak RM 3000 ke atas kesalahan suami (Samsudin), melafazkan talak di luar Mahkamah.
3. Noor Helmi Bin Hassan dan Foziah Binti Mohamed Salleh bercerai di luar Mahkamah pada tanggal 12.06.2008 bertempat di Rumah, No. 38, Batu 4 Segari 32200 Lumut, Perak. Perceraian di luar Mahkamah ini didaftarkan pada tanggal 19.07.2008 dan disidangkan Mahkamah pada tanggal 12.08.2008 setelah sidang dijalankan Hakim meminta suami melafazkan talak kali kedua dan memutuskan denda RM 1000 atas kesalahan yang dilakukan oleh suami (Noor Helmi) karena melafazkan talak di luar Mahkamah.²¹

Dalam perspektif hukum Islam, walaupun talak itu sah dilafazkan di luar mahkamah atau di rumah, namun untuk menjaga agar suami jangan seenaknya saja melafazkan kata talak sesuka hati, maka selain mematuhi seluruh syariat Islam, menurut Yusuf Qardhawi, seorang muslim juga diharuskan menghormati Undang-Undang dan Peraturan Negara dimana ia berdomisili, maka ia wajib mematuhi dan jangan sampai melanggar peraturan yang ada untuk memfungsikan lembaga peradilan Islam. Menurut madzhab *Imamiyyah*,²² dan

²¹Data dari Mahkamah Rendah Syariah Seri Manjung, Perak.

²²Mereka disebut juga Syi'ah 12, karena mereka mempunyai 12 Imam nyata yaitu Sayyidna Ali ibnu Abi Thalib (w.40 H), Hasan (w.49 H), Husein (w.61 H), Ali Zain al-'Abidin (w.95 H), Muhammad al-Baqir (w.113 H), Ja'far al-Shadiq (w.16 H), Musa al-Kazhim (183 H), Ali al-Ridha' (w.203 H), Muhammad al-Jawwad (w.221 H), Ali al-Hadi (w.254 H), al-Hasan al-Askari (w.261 H) dan Muhammad al-Muntazhar (lahir 256 dan menghilang 261 H). Pada Muhammad al-Muntazhar berhenti rangkaian Imam-Imam nyata, karena Muhammad tidak meninggalkan keturunan. Muhammad, sewaktu masih kecil, hilang di dalam gua Mesjid *Samarra* (Iraq). Menurut keyakinan kaum Syi'ah 12, Imam ini menghilang buat sementara dan akan kembali lagi sebagai *al-Mahdi* untuk langsung memimpin ummat. Justru itu, ia disebut Imam yang bersembunyi (*al-Imam al-mustatir*) atau Imam Dinanti (*al-Imam al-*

Ismailiyyah, talak dengan kiasan (*kinayah*) dan *isyarat*, hukumnya tidak sah. Menurut madzhab al-Zhahiri (Abu Sulaiman Dawud al-Zhahiri, Kufah 815 - Baghdad 883 M, dan Ibnu Hazm al-Andalusi 994-1064 M), tidak sah talak kecuali dengan menggunakan tiga lafazh yang disebutkan dalam al-Qur'an yakni surah *al-Baqarah* ayat 226, 229 dan 231, *al-Nisa'* ayat 130, *al-Ahzab* ayat 28 dan *al-Thalaq* ayat 1 dan 2, yaitu *al-thalaq* (perceraian), *al-sarah* (melepaskan) dan *al-firaq* (perpisahan).²³ Menurut *madzhab Imamiyyah*, talak yang diucapkan tiga kali dalam satu majlis atau talak tiga yang diucapkan dengan satu kalimat, dihukumkan sebagai talak satu saja. Sedangkan sebagian madzhab sunni, menganggapnya jatuh sebagai talak tiga (*ba'in kubra*). Madzhab *Imamiyyah* dan *Ismailiyyah* mengharuskan dua orang *saksi* dalam talak berdasarkan surah al-Thalaq ayat 12, artinya, Dan bawalah saksi-saksi yang adil di antara kalian. Namun, kalangan ahli fikih sunni pada umumnya berpendapat bahwa hukumnya hanya *mustahab*, bukan *wajib*.²⁴

Penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah menurut aturan Enakmen Keluarga Islam Perak, dapat dipandang sebagai *al-Siyâsah al-syar'iyyah* yaitu pengaturan yang dilakukan pemerintah (Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak Malaysia atau Kompilasi Hukum Islam

muntazhar). Selama bersembunyi, ia memimpin ummat melalui raja-raja yang memegang kekuasaan dan ulama mujtahid syi'ah. Syi'ah 12 menjadi faham resmi di Persia (Iran) semenjak permulaan abad ke-16 M, yaitu setelah faham itu dibawa ke sana oleh Syah Ismail. Di samping syi'ah 12, ada pula Syi'ah Tujuh (*Isma'iliyyah*). Imam-imam mereka sampai dengan Imam keenam masih sama dengan Imam-imam syi'ah 12. Perbedaan mulai timbul pada Imam Ketujuh yaitu Ismail, anak dari Ja'far al-Shadiq, lebih dahulu wafat daripada Imam Keenam ini. Justru itu, tempat Ismail sebagai Imam Ketujuh diganti oleh adiknya, Musa al-Kazhim. Bagi Syi'ah 7, Ismaillah Imam Ketujuh dan bukan Musa al-Kazhim. Khalifah-khalifah Fathimi di Mesir, golongan Qaramithah, Hasyasyin, kaum Ismail di India, Pakistan dan sebagian di Iran dan kaum Duruz di Libanon dan Siria termasuk dalam golongan Syi'ah Ismailiyyah. Berlainan dengan Syi'ah 12 dan 7, Syi'ah Zaidiyyah (dekat dengan faham sunni), yaitu pengikut Zaid ibnu Ali Zain al-'Abidin yang tidak menganut teori Imam Bersembunyi. Imam harus langsung memimpin ummat. Namun, jabatan Imam harus berasal dari keturunan Ali dan Fathimah. Syi'ah Zaidiyyah dalam sejarah membentuk kerajaan di Yaman dengan San'a sebagai ibu kota. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cetakan V, 1985, Jilid I), halaman 99 dan 100, dan Abdul Aziz Dahlan, Ketua editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan VI, 2003, Jilid 5), hal. 1708.

²³ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan I, 1996, Jilid 6), hal. 1981.

²⁴ Muhammad Ibrahim Jannati, op.cit., hal. 29.

Indonesia) untuk merealisasikan asas *Jalbu al-mashâlihi wa daf'u al-mafâsidi* (Mengambil kemaslahatan dan menolak mudarat). Pengaturan ini dilakukan sejauh tidak melampaui dasar-dasar syariat universal Islam, kendatipun tidak sejalan dengan sebahagian hasil ijtihad para mujtahid sebelumnya. Pemerintah sebagai *Ulu al-amri* (Penguasa di negara Islam) dapat membuat ketentuan dan aturan yang mengikat masyarakat muslim selama tidak bertentangan dengan maksud diturunkannya syariat Islam (*Maqashidu al-tasyri'*). Adanya ketentuan perkawinan dan perceraian dalam perundang-undangan (peraturan pemerintah) tidak mengurangi ketentuan dan hukum yang berlaku dalam lembaga perkawinan dan perceraian, inklusif dalam Islam.

Dalam ajaran Islam, istri yang diceraikan berhak mendapat nafkah selama ia masih berada dalam iddah (masa tunggu). Sementara dalam peraturan pemerintah Indonesia dan Malaysia ditentukan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya selama ia belum kawin lagi dengan laki-laki lain. Istri mendapat bagian sepertiga dari penghasilan (gaji) bekas suaminya kalau mempunyai anak dan setengah kalau tidak mempunyai anak, tetapi apabila perceraian terjadi karena istri melakukan nusyuz terhadap suaminya, bekas istri tidak mendapat nafkah dari suaminya. Pembagian harta seperdua atau sepertiga selama istri belum kawin lagi dapat juga ditinjau sebagai *al-Siyâsah al-syar'iyyah* pemerintah. Ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah Saw tidak menjelaskan kuantitas nafkah tersebut. Pendapat ulama tentang nafkah ini juga muncul secara beragam, meskipun semuanya berkisar pada masalah nafkah sandang, pangan dan papan (tempat tinggal istri atau rumah). Tidak ada pendapat yang menentukan jumlahnya secara tegas dan jelas. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat dan adat setempat secara makruf. Pembagian nafkah ini juga berdasar pada pertimbangan bahwa harta tersebut adalah pencarian bersama suami

dan istri. Karenanya, istri berhak mendapat separo dari harta bersama tersebut. Namun, pembagian harta bersama untuk bekas istri hanya terjadi pada waktu perceraian, sedangkan pemberian untuk bekas istri diwajibkan selama ia masih berstatus janda, suatu hal yang memang belum terdapat dalam pembahasan literatur fikih klasik.

Seorang suami dituntut untuk berfikir panjang sebelum menceraikan istrinya. Sebab, sebagai konsekuensinya, ia harus membagi penghasilannya kepada mantan istrinya. Kalaupun terjadi perceraian, suami masih dapat berfikir ulang terhadap keputusan yang diambilnya. Daripada harus terus menerus menafkahi bekas istrinya, tentu akan lebih baik baginya kalau kembali (rujuk) dan memperbaiki rumah tangganya, apalagi kalau mereka mempunyai anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya.

Tampaknya, penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah menurut aturan Enakmen Keluarga Islam Perak, cenderung mengikuti pendapat madzhab *Imâmiyyah (Ja'fariyyah)* dan *Isma'iliyyah* dalam prakteknya. Walaupun mereka enggan dan alergi bila dikaitkan dengan *fikih madzhab syî'i* tersebut, karena masih dianggap berseberangan dan bertentangan dengan faham *sunnî* sebagai *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk talak yang dilafazkan suami di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung adalah dalam bentuk *sharih* (jelas dengan menyebutkan lafaz talak satu) sebanyak 7 orang, mengucapkan dengan talak dua 2 orang dan mengucapkan talak tiga sebanyak 1 orang) dan dalam bentuk *kinayah* (kiasan sebanyak 3 orang, misalnya pulanglah ke rumah orang tuamu yang lebih nyaman).
2. Prosedur penjatuhan talak di luar sidang Mahkamah Syariah Seri Manjung Perak diatur di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak tahun 1984 (Pindaan/Penjelasan 1992) yaitu jika laki-laki (suami) menceraikan isterinya dengan melafazkan dengan bentuk apa saja di luar sidang Mahkamah Syariah (tanpa pengakuan Mahkamah), maka laki-laki (suami) itu telah melakukan suatu kesalahan, karena bercerai di luar Mahkamah dan dalam masa tujuh hari setelah talak itu dilafazkan di luar Mahkamah, maka hendaklah bagi pihak-pihak yang berkewajiban (istri atau saksi-saksi yang mengetahui perceraian ini) melaporkan perceraian itu (perbuatan) itu kepada Mahkamah. Perbuatan itu merupakan suatu kesalahan dan akan disanksi tidak melebihi tiga ribu ringgit Malaysia (RM 3000) atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya (sanksi dan dipenjara), jika terbukti melakukan kesalahan.
3. Penyelesaian talak yang dilakukan di luar Mahkamah Syariah Seri Manjung dalam Perspektif hukum Islam bahwa talak itu sah saja dilafazkan di luar mahkamah atau di rumah, namun untuk menjaga agar suami jangan seenaknya saja melafazkan kata talak sesuka hati, maka selain mematuhi seluruh syariat Islam, menurut Yusuf Qardhawi,

seorang muslim juga diharuskan menghormati Undang-Undang dan Peraturan Negara dimana ia berdomisili, maka ia wajib mematuhiya dan jangan sampai melanggar peraturan yang ada untuk memfungsikan lembaga peradilan Islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat terus menerus melakukan dakwah dan penerangan agar penjatuhan talak tidak lagi dilakukan di luar Mahkamah.
2. Agar Mahkamah lebih tegas dalam melakukan putusan-putusannya dan melakukan pertimbangan hukum yang dapat memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang bahaya penjatuhan talak di luar Mahkamah.
3. Diharapkan kepada kerajaan (dinas) agar mempertinggikan hukuman bila ada suami yang melakukan perceraian talak di luar Mahkamah, karena Enakmen Keluarga Islam Perak belum mampu membendung terjadinya penjatuhan talak di luar Mahkamah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Itermas, 1997).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Agustus 2006) Cetakan XIII.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, (773-852 H), *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Bandung Indonesia: t.t Syirkah Liththab,i wa al-Nasyr).
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmat al-Tasyri' al-Islami*, penerjemah t.t Idrus H.Alkaf, *Hikmat dan Filsafat Tasyri'*, Bintang Pelajar).
- Badan Kehakiman Perak, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak*, (Ipoh, Malaysia: Jabatan Kehakiman Perak, 2004).
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid I, (Jakarta Timur, Rawamangun: Prenada Media, Juli 2003), Edisi Pertama.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ketua Tim Editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2006), Jilid 3, 5 dan 6.
- Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Depag R.I.
- Dokumentasi pada *Lampiran Saman* dan Pernyataan Tuntutan, Seri Manjung, 2006.
- Haji Mokhtar, Mohd Naim, *Talak ; Konsep dan Perlaksanaan Di Mahkamah Syariah Jabatan Undang-Undang Islam, Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim*, (Malaysia: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2000).
- Helmiati, *Islam dalam Masyarakat dan Politik Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, UIN Suska Riau, 2007) Cetakan I.
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Solehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004) Cetakan I.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Durus fi Fiqhi al-Muqarani*, penerbit Majma' al-Syahid al-Shadr al-'Ilmi, Cetakan I, Qum, Iran 1985 M, penerjemah Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi dan Ja'fari*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2007) Cetakan I.
- J.Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), Cetakan IV.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001) Edisi Pertama.

Komaruddin, *Ensiklopedi Menegemen*, (Jakarta: Bumi Aksara 1994), Cetakan I.

Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cetakan I.

K.Yin, Robert, *Studi Kasus, (Desain dan Metode)*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, Maret, 2002), Cetakan III.

Lampiran Saman dan Pernyataan Tuntutan, (difailkan oleh Pihak Platif yang Beralamat di Nomor 10, Parit Haji Aman, 34300, Bagan Serai, Perak Darul Ridzuan, 19.1.2009).

M.Moeliono, Anton, Penyunting Penyelia, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, , 1990), Cetakan IV.

M.Zein, Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, (Jakarta : Diterbitkan atas Kerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Jakarta dan Balitbang Depag RI: Kencana, 2004) Cetakan I.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rawamangun: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cetakan II.

Mohammad Yazid, Asy'ari, *Diskusi Ilmiah Undang-Undang Negeri Perak*, (Perak: Kertas kerja, 2003).

Muhammad Uwaidah, Kamil, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), Cetakan I.

Mujahidin, Akhmad, et.al, *Aktualisasi Hukum Islam Tekstual dan Kontekstual*, (Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, 2007), Cetakan I.

Muzhhar, Atho' dan Nasution, Khairuddin, editor, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberangkatan Undang-Undang Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta Selatan : Ciputat Press, 2003), Cetakan I, Oktober 2003.

Perak, *Enakmen Keluarga Islam*, (Perak: Badan Kehakiman Perak, 2004).

Pringgodigdo, A.G, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), Cetakan VI.

Qardhawi, Yusuf, *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, penerjemah As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cetakan III, Jilid II, Sya'ban 1420 H/November 1999 M.

- , *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, penerjemah As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cetakan III, Jilid I, Sya'ban 1420 H/November 1999 M.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Deirut: Dar al-fikr, 1983).
- , *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Mohammad Thoib, Jilid 8, (Bandung: al-Ma'arif 1990), Cetakan VII, 1990.
- Syalthout, Mahmud dan al-Sayis, M. Ali, *Muqranat al-Madzahib fi al-Fiqhi*, alih bahasa Ismuha, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cetakan VII.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1083.
- Syamsu, Nazwar, *Kamus al-Qur'an, Berisi Petunjuk Surat dan Ayat*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982) Cetakan II.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006) Edisi I, Cetakan I.
- Yamani, Ahmad Zaki, *al-Syari'at al-Khalidat wa Musykilat al-'Ashr*, alih bahasa, oleh Mahyuddin Syaf, Syariat Islam Yang Abadi, *Menjawab Tantangan Masa Kini*, (Bandung: al-Ma'arif, 1974) Cetakan I.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), Cetakan X.
- Zulkayandri, *Fiqh Muqaran, Merajut Ara al-Fuqaha dalam Kajian Fiqih Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, Juni 2008) Cetakan I.

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Jumlah Penduduk.....	16
TABEL II	: Sarana Pendidikan.....	18